

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Desa yang Dikelola BUMDes Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2005 – 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Pembangunan Daerah Tertinggal, Kamandesa PDTT, Kantor Desa Glagah, Lapopran Keuangan BUMDes, dan Kantor Pemerintah Daerah. Alat analisis yang digunakan adalah model ARDL data *time series* dengan *software E-Views 12*. Hasil estimasi secara parsial menunjukkan bahwa jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif serta jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, jumlah dana sarana prasarana sosial desa serta jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Kata kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Dana Desa, BUMDes

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Village Funds managed by Village-Owned Enterprises (BUMDes) on the number of impoverished residents in Glagah Village, Temon District, Kulon Progo Regency, from 2005 to 2023. This study utilizes secondary time series data obtained from the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Kemendesa PDTT), the Glagah Village Office, BUMDes financial reports, and the Regional Government Office. The analytical tool employed is time series data model ARDL using E-Views 12 software. The partial estimation results indicate that the amount of capital funding and productive economy and conversely, the amount of community income improvement funds has a negative and significant influence on the number of impoverished residents. Lastly, the amount of village social infrastructure funds and village economic infrastructure funds have no effect on the number of impoverished residents.

Keywords: *Number of Impoverished Residents, Village Fund's, Village-Owned Enterprise's (BUMDes)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Kemiskinan	11
2.1.2. Dana Desa	15
2.1.3. Alokasi Dana Desa	17
2.1.4. Hubungan Kemiskinan dengan Dana Desa	19
2.1.5. BUMDes	20
2.1.6. Hubungan Antara Variabel Independent dengan Variabel Dependent	23
2.1.6.1. Jumlah Dana Permodalan dan Ekonomi Produktif	

dengan Jumlah Penduduk Miskin	23
2.1.6.2. Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Miskin	24
2.1.6.3. Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin	25
2.1.6.4. Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin	26
2.2. Penelitian Terdahulu	27
2.3. Kerangka Pemikiran Konseptual	30
2.4. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Data dan Sumber Data	34
3.3. Alat Analisis	35
3.3.1. Uji Asumsi Klasik.....	39
3.3.1.1. Uji Normalitas.....	39
3.3.1.2. Uji Multikolinieritas.....	39
3.3.1.3. Uji Heteroskedastisitas	40
3.3.1.4. Uji Autokorelasi.....	40
3.3.2. Uji Statistik	41
3.3.2.1. Uji t	41
3.3.2.2. Uji F	43
3.3.2.3. Koefisien Determinasi.....	44
3.4. Definisi Operasional Variabel	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Deskripsi Data.....	47
4.1.1. Jumlah Penduduk Miskin	47
4.1.2. Dana Desa	48
4.2. Hasil Penelitian.....	53
4.2.1. Hasil Persyaratan Analisis	583
4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	58

4.2.2.1. Uji Normalitas.....	58
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	59
4.2.2.3. Uji Heterokedastisitas	60
4.2.2.4. Uji Autokorelasi.....	60
4.2.3. Hasil Uji Statistik.....	61
4.2.3.1. Uji t	61
4.2.3.2. Uji F	64
4.2.3.3. Koefisien Determinan	65
4.3. Pembahasan	66
4.3.1. Peran jumlah dana Permodalan dan Ekonomi Produktif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah.....	66
4.3.2. Peran Jumlah dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah.....	67
4.3.3. Peran Jumlah dana Sarana Prasarana Sosial Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah.....	68
4.3.4. Peran dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah.....	68
BAB V PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Desa Glagah Tahun 2019-2023 (persen).....	4
Tabel 1.2 Dana Desa Glagah dari Pemerintah Tahun 2019-2023 (juta rupiah).....	5
Tabel 1.3 Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 4.1 Data Penduduk Miskin Desa Glagah Tahun 2005 – 2023 (jiwa)	47
Tabel 4.2 Jumlah Dana Permodalan dan Ekonomi Produktif Tahun 2005 – 2023 (Juta rupiah).....	49
Tabel 4.3 Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat Tahun 2005 – 2023 (Juta Rupiah)	50
Tabel 4.4 Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa Tahun 2005 – 2023 (Juta rupiah).....	51
Tabel 4.5 Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa Tahun 2005 – 2023 (Juta rupiah).....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Stasioner Augmented Dickey-Fuller Tingkat Level.....	593
Tabel 4.7 Hasil Uji Stasioner Augmented Dickey-Fuller Tingkat Level First Difference	594
Tabel 4.8 Panjang Lag Optimum	595
Tabel 4.9 Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek.....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Kointegrasi Bound Test.....	57
Tabel 4.11 Hasil Hasil Estimasi Jangka Panjang.....	58
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Normalitas	59
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Heterokedastisitas.....	60
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Autokorelasi.....	601
Tabel 4.16 Hasil Pengujian t Jangka Pendek	61
Tabel 4.17 Hasil Pengujian t Jangka Panjang	613
Tabel 4.18 Hasil Pengujian F	65
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Penelitian	31
Gambar 4.1 Skema Kerangka Penelitian.....	55
Gambar 4.2 Skema Kerangka Penelitian.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian	78
Lampiran 2. Hasil Uji Akar Unit Tingkat Level	78
Lampiran 3. Hasil Uji Akar Unit Tingkat First Difference	80
Lampiran 4. Penentuan Lag Optimum	81
Lampiran 5. Hasil Estimasi Jangka Pendek	82
Lampiran 6. Uji Kontegrasi Bound Test	83
Lampiran 7. Hasil Estimasi Jangka Panjang	83
Lampiran 8. Uji Stabilitas CUSUM	84
Lampiran 9. Uji Stabilitas CUSUM Test	84
Lampiran 10. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas	85
Lampiran 11. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas	85
Lampiran 12. Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas	86
Lampiran 13. Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, dimana pembangunan tersebut merupakan upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemiskinan merupakan masalah yang telah mengglobal. Menurut beberapa para ahli salah satunya Martin dan Schuman (1996), kemiskinan di tingkat global menjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekuasaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya dinikmati oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia yaitu 80% dapat digolongkan pada kelompok masyarakat miskin(Eni, 1967).

Program memperlancar pembangunan daerah, pemerintah menetapkan dasar hukum yang diterapkan pada setiap pemerintah daerah yaitu Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemertintah Daerah, dan hak otonomi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Seiring dalam pelaksanaanya pemerintah juga mengeluarkan dasar hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dimana dengan pemanfaatan ekonomi dan potensi masyarakat yang ada diharapkan pemerintah mampu menjalankan tujuan dari suatu program pembangunan daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan ekonomi yang maksimal mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi layak. Namun dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang perlu di pertimbangkan yaitu tingkat investasi masyarakat pada umumnya. Sedangkan

tingkat investasi dipengaruhi juga dalam segi pendapatan seseorang. Rendahnya pendapatan seseorang menjadikan kendala dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi bangsa. Sehingga dengan demikian permasalahan utama dalam proses pembangunan yang didalamnya meliputi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yaitu masalah kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi perhatian banyak pihak untuk sekian lama. Tetapi kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu adanya kekeliruan dalam strategi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Strategi pertumbuhan ekonomi yang cepat serta tidak diimbangi dengan pemerataan. Di Indonesia, penduduk miskin masih menjadi salahsatu masalah pembangunan. Data penduduk miskin yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) seringkali menjadi bahan perdebatan terutama dikalangan politisi dan akademisi. Sebenarnya dilihat dari kemiskinan di Indonesia tergolong relatif mudah, apabila indikator utama kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan primer, sehingga realitas penduduk Indonesia masih banyak yang sulit memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Upaya pengentasaan kemiskinan sudah pasti telah dilakukan pemerintah, melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan charity, membagikan uang kepada kaum dhuafa atau manusia yang hidup dalam zona kemiskinan, ketertindasan, kelemahan, dan ketidak berdayaan dalam bentuk program bantuan tunai langsung (BLT). Rupanya solusi yang jitu dalam menanggulangi kemiskinan belum di temukan.

Penduduk miskin Indonesia sebagian besar berada di wilayah desa dan desa merupakan objek pembangunan utama, maka upaya pengurangan kemiskinan akan efektif jika dimulai dari wilayah desa. Berbagai potensi desa dapat diandalkan dalam upaya pengurangan kemiskinan. Aset terbesar yang dimiliki desa ialah lekatnya nilai gotong royong dan nilai-nilai lokal lainnya. Selain itu, kondisi modal sosial (*social capital*) masyarakat desa yang sudah sangat kuat merupakan hal yang sangat memungkinkan untuk mendorong kemandirian masyarakat di wilayahnya. Kemampuan desa untuk mengelola pembangunan lebih mandiri yang didukung oleh semua unsur dan sumber daya desa sangat

penting bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat, terlebih bagi masyarakat miskin didesa. Desa yang dapat menjalankan pengelolaan pembangunan secara mandiri bukan hanya mampu menggerakkan seluruh aset sumber daya yang dimiliki desa, tetapi desa juga akan mampu memperbaiki kebutuhan dasar warga, kebutuhan penghidupan, memperjuangkan hak warga dan menata kehidupan secara berkelanjutan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal. Secara yuridis, peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasar pada UU No.32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. BUMDes hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi di pedesaan, seperti terbatasnya akses terhadap lapangan kerja, rendahnya pendapatan masyarakat, dan kurangnya pemanfaatan potensi desa.

Masyarakat akan memperoleh keuntungan pendirian BUMDes diwilayahnya. Keuntungan tersebut dapat berupa uang mupun barang dan jasa, bahkan pelayanan publik. Jika pembentukan (BUMDes) dimaksudkan untuk mengelolah kekayaan sumber daya alam di desa, maka harus dipikirkan bagaimana pengelolah sumber daya alam tersebut sehingga rangkaian proses produksinya bisa memberikan nilai tambah bagi desa. Nilai tambah tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk uang maupun pelayanan publik yang lebih baik, misalnya: pengobatan murah, pembayaran listrik rumah tangga, (Usaha Mikro Kecil Menengah) UMKM, listrik Murah, sekolah Murah dan lain sebagainya. (Badan Usaha Milik Desa) BUMDes dapat berperan optimal jika berfungsi sebagai fasilitator pengembangan usaha rakyat, misalnya: pemberian akses yang muda dalam transaksi jual beli, hasil olahan, dan lain sebagainya.

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai. Dengan demikian pemerintah desa harus mengabambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan dana desa sebagai stimulus

pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa. Dalam penggunaan dana desa harus ada ukuran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga manfaat dari dana desa tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai suatu objek yang menerima outputnya. Dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan dana desa maka dengan membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang secara yuridis telah diatur dalam pasal 88, 89 dan 90 UndangUndang No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Desa Glagah
Tahun 2019-2023 (persen)**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2019	20,82%
2020	20,52%
2021	19,17%
2022	17,47%
2023	15,43%

Sumber : Database web Kelurahan Glagah

Tabel 1.1. menunjukkan jumlah penduduk miskin di Desa Glagah terjadi trend penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan dari 20,82% pada tahun 2019 menjadi 15,43% pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan kemajuan yang positif, jumlah penduduk miskin pada tabel diatas berdasarkan kriteria pengukuran jumlah penduduk miskin dalam bentuk persen yang telah ditentukan Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2024 diatas 10% dikatakan masih tinggi dengan dasar keseluruhan jumlah penduduk wilayah tersebut sebesar 2.405 jiwa. Salah satu faktor yang disinyalir berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan ini adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi yang sudah ada. Padahal, secara strategis, Desa Glagah memiliki keunggulan signifikan. Dalam lima tahun terakhir, berdasarkan data yang tersedia, wilayah

Desa Glagah telah didukung oleh fasilitas transportasi dan infrastruktur wilayah yang memadai. Dukungan infrastruktur ini seharusnya menjadi modal besar bagi masyarakat untuk lebih produktif dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mendorong pengurangan angka kemiskinan di Desa Glagah. Data jumlah penduduk miskin pada tabel menunjukkan presentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 20,82% sebagai tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasar mengingat di tahun itu terjadinya wabah Covid-19 dan perencanaan pembangunan Bandara Internasional. Di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 20,52%, meskipun penurunan ini kecil hal ini menunjukkan adanya Upaya yang membuahkan hasil dalam mengatasi jumlah penduduk miskin di desa Glagah. Tahun 2021 presentase jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 19,17% yang ditunjukkan bahwa program – program pemerintah dan inisiatif lokal mulai berdampak positif. Kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun lebih signifikan menjadi 17,47% yang ditandai adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan akses terhadap sumber daya di desa. Dan yang terakhir tahun 2023 presentase jumlah penduduk miskin mencapai 15,43% yang menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang makin membaik namun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga desa dapat hidup dengan layak.

**Tabel 1.2 Dana Desa Glagah dari Pemerintah
Tahun 2019-2023 (rupiah)**

Tahun	Dana Desa
2019	Rp 907.115.000,00
2020	Rp 1.000.093.422,00
2021	Rp 1.034.388.768,00
2022	Rp 1.127.191.400,00
2023	Rp 1.288.324.777,00

Sumber : Database web Kelurahan Glagah

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa, dana desa merupakan salah satu cara desa menghasilkan uang untuk pembangunan daerahnya. Dana desa Glagah yang diperoleh dari pemerintah berdasarkan tabel 1.2. menunjukkan peningkatan alokasi dana desa dari tahun ke tahun secara konsisten, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat desa melalui peningkatan alokasi dana desa. Dalam pengelolaanya dana desa memiliki dua prioritas yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, salah satu tujuan penggunaan dana desa bidang pembangunan yaitu pembangunan maupun renofasi insfrastuktur desa seperti perbaikan jalan, jembatan posyandu, PAUD, BUMDes. Selain itu penggunaan dana desa juga berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat desa seperti meningkatkan badan usaha miliki desa (BUMDes) pada desa, program padat karya, mengadakan pelatihan guna mendorong masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan sehingga nanti nya dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di desa setempat. Peningkatan alokasi dana desa ini semakin bertambah karena kemajuan dan kemandirian di desa Glagah dalam pengurangan jumlah penduduk miskin yang diperlihatkan pada tabel 1.1. dalam 5 tahun terakhir.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh dana desa yang dikelola BUMDes untuk mengukur keberhasilan penerapan program dana desa sebagai sumber pendanaan dalam bentuk dukungan mengurangi jumlah penduduk miskin sebagai wujud kemandirian desa dalam mengalokasikan sumber -sumber yang ada, sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang efektif dengan menyesuaikan potensi tiap – tiap daerah. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor krusial dalam pengelolaan Dana Desa oleh BUMDes yang berkontribusi pada efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemahaman akan faktor-faktor ini esensial untuk merumuskan rekomendasi praktis guna penguatan peran BUMDes ke depan. Mengingat belum adanya penelitian mengenai pengaruh dana desa yang dikelola BUMDes untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Desa Glagah dengan parameter dana permodalan dan ekonomi peroduktif, dana

peningkatan pendapatan masyarakat, dana sarana prasarana sosial desa, dan dana sarana prasarana ekonomi desa periode 2005 – 2023, dengan ini peneliti merumuskan penelitian yang berjudul **”Analisis Pengaruh Dana Desa yang Dikelola BUMDes terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2005 – 2023”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.
2. Bagaimana pengaruh jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.
3. Bagaimana pengaruh jumlah dana sarana prasarana sosial desa terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.
4. Bagaimana pengaruh jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah tersebut, maka Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.
2. Menganalisis pengaruh jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.

3. Menganalisis pengaruh jumlah dana sarana prasarana sosial desa terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.
4. Menganalisis pengaruh jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat di gunakan sebagai bahan rujukan, referensi, dan bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya ataupun pembahasan lebih lanjut serta penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggungjawab akademik dalam memberikan sumbangan ilmu yang diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi karya ilmiah di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian agar dapat di gunakan sebagai informasi untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam hal pengetasan kemiskinan di Desa Glagah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.

1.5. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Desa yang Dikelola BUMDes Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2005 - 2023” belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Keaslian penelitian ini ditunjukkan oleh tabel 1.3. sebagai berikut:

Tabel 1.3
Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Variabel	Alat analisis	Hasil Penelitian
1.	Haryati, (2021)	• Dependent: Jumlah Penduduk Miskin Aceh Barat • Independet: 1. Pendapatan Asli Desa 2. BUMDes	• Model regresi data panel.	• Pendapatan BUMDes memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Ini berarti semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan BUMDes, semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
2.	Annisa et al., (2023)	• Dependent: Data Kemiskinan Kabupaten Lombok Timur, yang berjumlah 254 desa, selama periode 2019-2021. • Independent: 1. Laporan realisasi Dana Desa 2. Data BUMDes.	• Model regresi data panel.	• Dana Desa (DD) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. • Jumlah BUMDes tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur.
3.	Abdjul et al., (2023)	• Dependent : Tingkat Kemiskinan Se-Indonesia • Independent : 1. Dana Desa 2. PDRB	• Metode kuantitatif	• Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan dana desa. Terdapat perbedaan secara nyata bahwa tingkat kemiskinan sebelum diterapkan kebijakan dana desa lebih tinggi daripada saat diterapkannya kebijakan dana desa, hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan kemiskinan. Variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan disaat sesudah adanya penerapan kebijakan dana desa Se-Indonesia, Artinya setiap peningkatan Dana Desa akan menurunkan kemiskinan. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Se-Indonesia, Artinya setiap peningkatan PDRB akan meningkatkan kemiskinan.
4.	Wahyuddin et al., (2019)	• Dependent: Data kemiskinan di Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya • Independent: 1. Dana Desa 2. Alokasi Dana Desa	• Model regresi data panel	• Variabel Dana Desa (DD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. • Variabel Alokasi Dana Desa (ADD) juga berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
5.	Sunu et al., (2019)	• Dependent: 1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota provinsi Bali tahun 2015-2017 2. Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/	• Metode statistic deskriptif • <i>Path analysis</i>	• Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. • Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lanjutan Tabel 1.3

No	Peneliti	Variabel	Alat analisis	Hasil Penelitian
		rovinsi Bali tahun 2015-2017 • Independent: Dana Desa		
6.	Halulunga et al., (2024)	• Dependent: Data Kemiskinan 15 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara kurun waktu 2019-2023 • Independent: 1. Dana Desa 2. Alokasi Dana Desa	• Metode kuantitatif	• Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber: Jurnal Acuan

Berdasarkan pada tabel 1.3. diatas, diketahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada aspek lokasi, periode waktu penelitian, serta variabel independen yang digunakan dengan proksi yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada “Analisis Pengaruh Dana Desa yang Dikelola BUMDes Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2005 - 2023”. Variabel independent yang digunakan mencakup jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial desa, serta jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo di tahun 2005 – 2023.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak dahulu kala dan nampaknya akan tetap menjadi masalah aktual hingga kini. Oleh sebab itu, meskipun telah dilakukan program pengentasan kemiskinan, namun hingga kini kemiskinan masih tetap ada. Menurut Suharto dalam memahami kemiskinan, terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*), yakni paradigma Neoliberal dan Sosial Demokrat.

Pendukung Neo liberal berpendapat bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan - kelemahan dan atau pilihan - pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang apabila kekuatan - kekuatan pasar diperluas sebesar - besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi - tingginya. Oleh sebab itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat 'residual' (kesalahan dalam hasil), sementara, dan hanya melibatkan keluarga, kelompok-kelompok swadaya atau lembaga-lembaga keagamaan. Sementara itu, negara hanya berperan sebagai penjaga malam dan baru dapat melakukan campur tangan apabila lembaga - lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya. Teori Neo Liberal yakin bahwa berkat keunggulan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi secara alamiah akan mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Budiman mengemukakan bahwa paradigma ilmu sosial demikian, dalam diskursus teori pembangunan dunia ketiga, dikenal dengan istilah paradigma teori modernisasi. Menurut teori ini, kemiskinan dan keterbelakangan bangsa - bangsa dunia ketiga disebabkan oleh factor - faktor internal atau factor - faktor yang terdapat dalam negeri yang bersangkutan, yaitu faktor budaya mentalitas manusianya, meminjam istilah Inkeles dan Smith. Oleh karena itu, jika bangsa - bangsa dunia ketiga ingin melepaskan diri dari persoalan kemiskinan dan

keterbelakangannya, maka sebagaimana teori modernisasi Inkeles, mentalitas mereka harus diubah dari mentalitas tradisional ke mentalitas modern.

1. Teori Kemiskinan Adam Smith

Adam Smith memberikan pandangan yang mendalam mengenai kemiskinan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Smith (1776) mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan di mana individu tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan. Smith menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakmampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ketika seseorang hidup dalam kemiskinan, mereka tidak hanya terhalang dari memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga terpinggirkan dari interaksi sosial yang penting dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Pandangan Smith, kemiskinan dapat mengakibatkan isolasi sosial, di mana individu merasa terputus dari komunitas mereka. Hal ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk diputus, karena ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial dapat menghambat akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang lebih baik. Lebih jauh lagi, Smith berargumen bahwa kemiskinan dapat mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ketika sebagian besar populasi tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, potensi mereka untuk berkontribusi pada perekonomian menjadi terhambat. Oleh karena itu, Smith menekankan pentingnya menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, di mana semua individu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang paling umum terjadi dipedesaan. Kemiskinan dalam konteks berkaitan dengan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Baik yang bersifat material maupun non material, Bank dunia mendefinisikan yaitu dapat dipahami bahwa kemiskinan

terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin dan menyangkut standar hidup relatif dari masyarakat. Adapun itu banyak perspektif mengatakan salah satunya menjelaskan bentukbentuk kemiskinan. Menurut Jamasy kemiskinan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif yang melihat kemiskinan dari segi pendapatan, sementara kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan dari segi penyebabnya.

1. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi saat individu memiliki tingkat pendapatan yang dibawah garis kemiskinan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya untuk apalagi meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan tipe ini berpedoman pada satu standar yang konsisten, tidak berpengaruh oleh waktu dan tempat/negara.
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang terjadi pada saat individu memiliki pendapatan diatas garis kemiskinan, tipe ini yang paling banyak terjadi negara berkembang, seperti indonesia. Sementara dinegara-negara maju, kondisi ini menghadirkan tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota.
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan struktural akibat ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan kerja bagi golongan masyarakat lemah. Struktur sosial yang tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber tersedia, baik yang disediakan oleh alam, pemerintah maupun masyarakat yang ada disekitarnya.
4. Kemiskinan kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Sikap budaya itu, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas pembolos, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Sedangkan kebudayaan kemiskinan, merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-

orang miskin, seperti malas, mudah menyerah mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Ciri dari kebudayaan kemiskinan ini adalah masyarakat enggan mengintegrasikan dirinya dalam lembaga-lembaga utama, sekap apatis curiga, terdiskriminasi oleh masyarakat luas.

Kemiskinan dapat terjadi akibat beberapa faktor diantaranya akibat regulasi pemerintah yang dirasa kurang tepat pada kondisi masyarakat mayoritas, setiap individu memiliki sda yang berbedabeda sehingga terdapat ketimpangan antar individu. Adapun faktor - faktor penyebab kemiskinan antara lain:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya juga rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, upahnya pun juga rendah.
3. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses manusia mengembangkan hidupnya kecuali menjalankan apa yang terpaksa saat ini dapat dilakukan. Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, sehingga potensi manusia untuk mengembangkan kualitas hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas sumber daya manusia rendah maka akan mempengaruhi yang lain.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari individu si miskin itu sendiri. Ketidakmampuan individu dalam melakukan usaha atau kreatifitas, menjadikan hidup mereka. Sehingga secara garis besar kemiskinan timbul karena faktor internal. Contoh ketidakmampuan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan secara fisik misal cacat, kurang gizi, sakit – sakitan.
2. Di bidang intelektual misal kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangtahuan informasi.

3. Keterbatasan mental emosional misal malas, mudah menyerah, putus asa, serta temperamental.
4. Kelemahan spiritual misal tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin.
5. Kondisi psikologis yang kurang mendukung, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi atau stress, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan.
6. Ketidak terampilan misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan.
7. Tidak memiliki asset misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk apapun mulai dari tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja.

2.1.2. Dana Desa

Kebijakan pembangunan desa agar dapat lebih terarah dan terstruktur dilakukan dengan menyediakan dana desa. Hal ini dilatar belakangi masih terdapatnya kesenjangan dalam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia (Ramly et.al, 2018). dalam penyebaran pembangunan yang tidak merata disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola desa, tingkat kemiskinan yang tersebar dan luasnya wilayah desa yang disertai dengan adanya tingkat kesulitan geografis. Dana desa merupakan suatu bentuk kepedulian negara terhadap pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia. Dana desa diperuntukkan untuk dapat meningkatkan ekonomi desa dan pembangunan dalam desa. Desa sendiri memiliki kewenangan untuk dapat mengelola dana desa untuk dapat mempercepat pertumbuhan dan untuk pembangunan (saputra, 2016). Ada beberapa alasan pentingnya sumber pendapatan desa yaitu desa sendiri memiliki anggaran, adanya pendapatan dan belanja desa. Desa perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya dana desa tersebut maka akan membentuk usahausaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa sendiri perlu dana operasional untuk menjalankan layanan publik, serta perlunya program dan pembangunan desa.

Dana desa merupakan janji Negara kepada desa sebab desa memiliki peran penting dalam berdirinya Negara Kesatuan baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari APBN dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dalam pengalokasian dana desa. Sumber dana desa selain dari APBN juga bersumber dari alokasi dana desa yang diperoleh dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten sebesar 10 %, Dana desa juga bersumber dari hasil pajak daerah dan retribusi sebesar 10%, serta dana Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat, pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan evaluasi diatur dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014. Rincian dari dana desa berdasarkan Permenkeu No.93/PMK.07/2017. Adanya alokasi dana untuk setiap Kabupaten/ kota dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis wilayah.

Dana desa bermanfaat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya dana desa akan memberikan hampan untuk kemandirian dan kemajuan desa di seluruh bidang. Pengelolaan dana desa diprioritaskan pada pelaksanaan program desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dimanfaatkan harus dengan adanya kebijakan dan aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam pengelolaan dana desa, kepala desa perlu melibatkan masyarakat seperti mengadakan rapat dengan Badan Permusyawaratan Desa yang diikuti oleh perangkat desa dan wakil dari tokoh masyarakat seperti pemuka agama, perwakilan perempuan, masyarakat marginal, kepala dusun dan lainnya. Untuk dapat mengeluarkan pendapat serta ide untuk memajukan dan mensejahterakan desa dengan adanya dana desa tersebut. Tujuan dari adanya dana desa diharapkan menjadikan sebagai prioritas dalam pembangunan untuk pengentasan serta untuk pengembangan masyarakat.

Penggunaan dan pengelolaan dana desa menjadikan prioritas pemerintah saat agar benar-benar tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan dan bermanfaat bagi rakyat. Dan dalam pengelolaan dana desa perlunya sumber daya manusia

yang terampil, sosialisasi penyaluran, koordinasi dan evaluasi untuk dapat mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan dana desa sendiri harus memiliki skala prioritas sesuai dengan adanya program dan kegiatan yang diusulkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.3. Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat. Konsep kesenjangan fiskal dalam pengalokasian DAU sangat cocok digunakan di Indonesia karena mempertimbangkan beberapa aspek seperti kebutuhan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah, serta kondisi yang diharapkan antara lain DAU harus mendistorisi perumusan DAU sebagai pencapaian tujuan tertentu dalam kebijakan seperti kebijakan yang tidak merugikan dan penggunaan belanja pegawai sebagai variable yang mengatasi tingginya ketimpangan horizontal. Perhitungan DAU dilakukan oleh organisasi independent yang independen dari berbagai kepentingan politik. Tim Asistensi Materi Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal menjelaskan DAK merupakan bentuk pembayaran transfer pusat yang bertujuan untuk menyediakan dana bagi otoritas yang berpusat sekaligus memiliki tugas mendukung prioritas nasional. Seperti banyak negara lain, sebagai bentuk transfer hibah khusus akan sangat berperan dalam menjaga keselarasan arah pembangunan nasional. Selain itu DAK Indonesia berfungsi sebagai jembatan relasi standar pelayanan minimal nasional, yang artinya DAK harus dialokasikan pada daerah tertentu yang belum mencapai standar kualitas pelayanan public yang diharapkan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti yang ada di peraturan Bupati No.03 tahun 2014 pasal 03 sebagai berikut :

1. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum serta harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Dana ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mendukung kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara umum, tujuan utama dari Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Mendukung Pembangunan Desa: ADD digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Pembiayaan Kegiatan Pemerintahan Desa: ADD membantu pembiayaan kegiatan operasional dan administrasi pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan di desa dapat berjalan lancar.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Melalui ADD, desa dapat melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Dengan pengelolaan yang baik, ADD dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Setiap desa memiliki kewenangan untuk mengelola ADD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa macam indikator alokasi dana desa, yaitu:

1. Transparan adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Akuntabel adalah pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggungjawaban utama.
3. Partisipasi adalah suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.

2.1.4. Hubungan Kemiskinan dengan Dana Desa

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan program dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (2019) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diatur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ialah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Banyak factor yang mempengaruhi kemiskinan yang ada di desa, salah satunya yaitu dana desa. Dana desa yang semakin besar diharapkan dapat memenuhi sarana prasarana desa, kebutuhan dasar, potensi ekonomi local yang dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan yang kemudian akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat, pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan tertekan atau angka kemiskinan akan menurun. Berdasarkan penelitian oleh Sari dan Abdullah (2017) menunjukkan bahwa dana desa dapat mempengaruhi kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa Ketika dana desa meningkat maka akan mengurangi angka kemiskinan.

2.1.5. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya penguatan perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya pada umumnya. Artinya keberadaan BUMDes mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dan disamping itu, agar tidak berkembangnya sistem bisnis kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan masyarakat.

Penjelasan mengenai BUMDes yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa terlihat dalam pengamatan bahwa adanya BUMDes dalam memberikan manfaat sosial bagi kehidupan masyarakat warga desa. BUMDes merupakan suatu Badan Usaha yang dalam pengelolaan modal serta potensi dalam desa itu dilakukan sendiri oleh masyarakat dan perangkat desa dengan cara meningkatkan sektor ekonomi desa dilihat dari kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan paling utama adalah bahwa adanya BUMDes dapat menjadikan suatu lembaga Badan Usaha yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa dan penjelasan dari definisi BUMDes menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa BUMDes dibentuk dan didirikan berfungsi sebagai salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

BUMDes didirikan dan membentuk program usaha yang akan dijalankan harus berdasarkan keputusan dalam menjalankan program usahanya melalui Musyawarah desa yang dapat menentukan keputusan dalam menjalankan Badan Usaha tersebut yang bersifat kebijakan yang harus dipatuhi dan dijalankan mulai dari nama lembaga, pemilihan kader dan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan dalam BUMDes. Dalam proses pembentukan BUMDes akan ada dua momen besar yang melibatkan seluruh elemen penting, yaitu warga desa dengan perwakilannya pertama sosialisasi dan pembentukan tim yang akan bertugas mengawal proses pembentukan, dan kedua menyampaikan keputusan akhir. Dan seluruh proses ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab pemerintahan sebagai penyelenggara nya. Terbentuknya BUMDes sebagai lembaga desa yang berfungsi sebagai salah satu upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan aset dan potensi desa dipersenjatai dengan modal penyertaan dari desa. Tetapi bukan berarti semua urusan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan ekonomi desa menjadi tanggung jawab BUMDes dan masuk dalam ranah permasalahan BUMDes, melainkan harus adanya pemahaman bahwa BUMDes lahir sebagai suatu lembaga desa yang didirikan sebagai lembaga desa yang menjadi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan bukan satu-satunya solusi penyelesaian seluruh masalah perekonomian di desa.

Alat menggerakkan perekonomian di desa, maka BUMDes bercirikan semangat kolektif dan kegotongroyongan. Sedangkan maksud pendirian BUMDes adalah maksud untuk melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi desa dan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain membantu penyelenggaraan pemerintah desa, BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan perekonomian di desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi di tingkat desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

3. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
4. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan warga.
5. Membuka lapangan kerja baru untuk warga.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dari pendapatan asli desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) ini adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang ekonomi dan sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat desa utamanya mengenai bidang usaha. BUMDes yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan tujuan pendirian BUMDes yang telah dijelaskan, maka secara garis besar BUMDes memiliki 2 manfaat yaitu komersial dan pelayanan publik.

1. Komersil, Sebagai lembaga komersial BUMDes mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat untuk meningkatkan ruang yang lebih luas untuk masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa agar dapat mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan potensi dan skill sehingga mengurangi urbanisasi.
2. Pelayanan publik, BUMDes tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja tetapi, BUMDes juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasai BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yakni: unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi. Unit yang berada

didalam struktur organisasi BUMDes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Unit keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- 2) Unit usaha sector riil/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan atau waserda, foto copy, sablon, home industri, pengelolaan taman wisata desa, peternakana, perikanan, pertanian, dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga berbentuk badan hukum yang menaungi berbagai unit usaha dalam desa dan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan Desa. Adapun peran BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa, menurut seyadi yaitu :

- a. Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDES sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

2.1.6. Hubungan Antara Variabel Independent dengan Variabel Dependent

1. Jumlah Dana Permodalan dan Ekonomi Produktif dengan Jumlah Penduduk Miskin

Dana Permodalan dan ekonomi produktif merupakan dana yang disalurkan untuk mendukung usaha produktif yang berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, terutama di sektor usaha mikro dan kecil. Dana permodalan berperan sebagai katalis pengentasan kemiskinan melalui beberapa jalur. Akses terhadap modal memungkinkan masyarakat miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha produktif, meningkatkan investasi dalam pendidikan

dan kesehatan, serta membangun aset yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Sehingga ekonomi produktif mengacu pada aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) oleh Gary Becker (1964) menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan kesehatan meningkatkan produktivitas individu. Dana permodalan memungkinkan akses terhadap investasi modal manusia ini, yang pada gilirannya meningkatkan *earning capacity* dan mengurangi kemiskinan. Dana permodalan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Peningkatan modal manusia ini akan meningkatkan produktivitas individu, sehingga mereka lebih mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang lebih kompleks dan menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Dengan kata lain, orang yang terdidik dan terampil cenderung memiliki kesempatan lebih baik untuk menciptakan atau menemukan pekerjaan produktif.

2. Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat dengan Jumlah Penduduk Miskin

Dana Desa (DD) adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan langsung ke desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan dana desa adalah alokasi untuk Dana Peningkatan Pendapatan. Dana peningkatan pendapatan ini secara spesifik diarahkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang pada akhirnya diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.

Robert Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan. Pengelolaan dana desa yang partisipatif dan transparan dapat memperkuat modal sosial desa, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas program peningkatan pendapatan. Sedangkan James Coleman menekankan bahwa modal sosial dapat mengurangi biaya transaksi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini relevan dalam

konteks pengembangan BUMDes dan koperasi desa yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi antar anggota. Pengelolaan dana desa dan dana peningkatan pendapatan sering melibatkan musyawarah desa dan pembentukan kelompok-kelompok usaha. Proses ini membangun modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma kerjasama) di antara warga desa. Modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana peningkatan pendapatan, memastikan akuntabilitas, dan mendorong keberlanjutan usaha yang didukung dana tersebut. Kelompok usaha yang solid, misalnya, lebih mudah mendapatkan akses dan mengelola dana secara efektif. Pengelolaan dana peningkatan pendapatan melalui Dana Desa adalah instrumen kebijakan yang kuat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan menyediakan akses modal, mendorong ekonomi produktif lokal, dan memberdayakan masyarakat, dana peningkatan pendapatan dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja. Dukungan dari berbagai teori ekonomi memperkuat argumen bahwa investasi langsung di tingkat desa untuk kegiatan ekonomi produktif adalah strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan.

3. Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin

Dana Sarana Prasarana Sosial Desa (sering kali merupakan bagian dari Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sosial) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dana sarana prasarana sosial desa merupakan alokasi anggaran yang ditujukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan (Puskesmas, Posyandu), pendidikan (sekolah, perpustakaan), tempat ibadah, balai desa, dan fasilitas sosial lainnya yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat desa. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dana yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana sosial di desa berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, irigasi, listrik, fasilitas

kesehatan, dan pendidikan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin di desa. Dana desa membantu memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Dengan demikian, peningkatan sarana dan prasarana sosial desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama dalam teori pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur yang memadai meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Paul Samuelson (1954) mendefinisikan barang publik sebagai barang yang memiliki karakteristik *non-rivalry* dan *non-excludability*. Sarana prasarana sosial desa umumnya merupakan barang publik atau quasi-public goods yang memerlukan penyediaan oleh sektor publik karena market failure. Dana sarana prasarana sosial desa memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan penurunan kemiskinan. Investasi dalam sarana prasarana sosial desa melalui Dana Desa adalah strategi yang sangat efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dana ini bukan hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membangun modal manusia dan modal fisik di desa, yang merupakan pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, mendorong kegiatan ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik, dana ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat miskin, sehingga memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

4. Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin

Dana sarana prasarana ekonomi desa adalah alokasi anggaran yang ditujukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi produktif di

desa, seperti jalan usaha tani, irigasi, pasar desa, tempat pelelangan ikan (TPI), gudang hasil pertanian, akses jalan ke lahan produktif, jembatan penghubung, dan fasilitas pendukung ekonomi lainnya. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di desa, seperti infrastruktur pasar, jalan usaha tani, irigasi, dan fasilitas produksi, memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan. Dana ini meningkatkan kapasitas ekonomi desa dengan membuka akses pasar, memperlancar distribusi hasil produksi, dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat desa. Dengan demikian, dana sarana prasarana ekonomi desa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Dalam konteks desa, infrastruktur ekonomi menjadi fondasi untuk transformasi dari ekonomi subsisten ke ekonomi *market-oriented*. Model Neoklasik (Solow-Swan, 1956) ini menekankan peran akumulasi modal fisik (seperti infrastruktur) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang diinvestasikan dalam sarana prasarana ekonomi desa adalah bentuk akumulasi modal fisik yang secara langsung meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi di sektor-sektor kunci seperti pertanian dan UMKM. Peningkatan output per kapita ini, pada akhirnya, akan mengurangi kemiskinan. Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa bukan hanya tentang membangun fisik, tetapi tentang menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi masyarakat desa. Dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akses pasar, dana ini secara langsung memberdayakan masyarakat miskin untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya keluar dari jurang kemiskinan. Ini merupakan investasi strategis yang memiliki efek jangka panjang terhadap pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Haryati, (2021) menghasilkan peran Badan Usaha Milik Desa yang merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak Badan Usaha Milik Desa dalam

menanggulangi kemiskinan di Desa Peunaga Pasi Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa dalam menanggulangi kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 22 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa memberikan dampak positif terhadap kemiskinan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa telah menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat di Desa Peunaga Pasi Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Penelitian oleh Annisa et al., (2023) dengan judul Pengaruh Dana Desa Dan Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk menganalisis seberapa pengaruh Dana Desa dan Jumlah BUMDes Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur serta apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan regresi linier berganda periode penelitian selama enam tahun yaitu tahun 2018-2023. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan sesuai harapan, ini terlihat dari penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2018-2023 fluktuatif. 2. Besarnya dana desa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. 3. Jumlah BUMDes secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur. 4. Besarnya dana desa dan jumlah BUMDes secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur.

Penelitian Abdul et al. (2023) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan dana desa dan seberapa besar pengaruh Dana Desa dan PDRB baik secara parsial maupun simultan terhadap Kemiskinan Se-Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif yaitu merupakan data yang bersifat angka-angka yang diolah menggunakan metode statistika data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan jenis data

panel, gabungan time series dan cross section dari tahun 2010-2021 Se-Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan dana desa. Terdapat perbedaan secara nyata bahwa tingkat kemiskinan sebelum diterapkan kebijakan dana desa lebih tinggi daripada saat diterapkannya kebijakan dana desa, hal ini menunjukkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan kemiskinan. Variabel dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan disaat sesudah adanya penerapan kebijakan dana desa Se-Indonesia, Artinya setiap peningkatan Dana Desa akan menurunkan kemiskinan. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Se-Indonesia, Artinya setiap peningkatan PDRB akan meningkatkan kemiskinan.

Penelitian selanjutnya dari Wahyuddin et al. (2019) menganalisa dan melihat efektifitas distribusi pemanfaatan dana desa di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Data yang digunakan berupa data time series dari tahun 2015 hingga tahun 2018 yang dikumpulkan melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan mendatangi langsung ke desa-desa di kecamatan kuala. Sementara data sekunder diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS), telaah dokumen, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini melakukan observasi terhadap 10 desa sebagai sample dari 17 desa di Kecamatan Kuala. Metode analisa menggunakan regresi data panel dengan metode analisa random effect model (REM). Dari hasil regresi model random effect ditemukan bahwa variabel dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan Probabilitas sebesar $0,0000 = p\text{-value } \alpha = 5\%$. Kemudian variabel alokasi dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dengan Probabilitas sebesar $0,0000 = p\text{-value } \alpha = 5\%$. Artinya dengan menambahkan 1% dana desa atau meningkatkan dana desa akan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.

Penelitian selanjutnya dari Sunu et.al menghasilkan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data dana desa

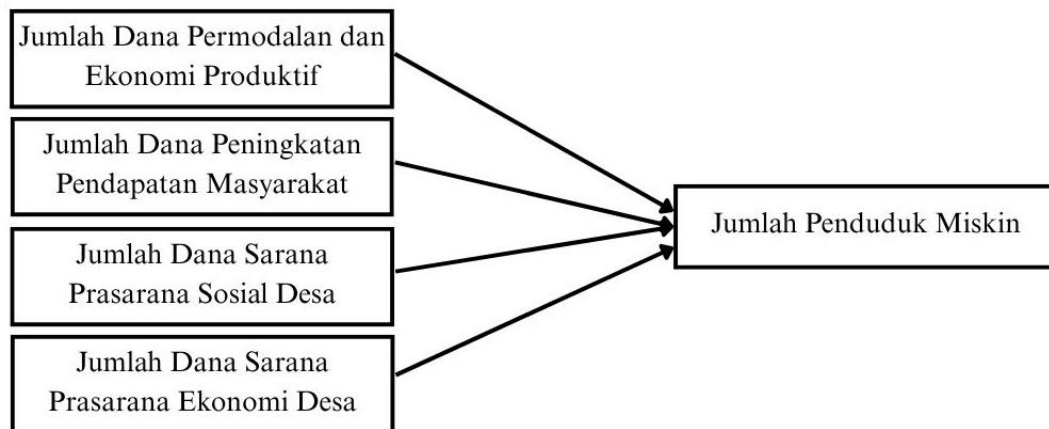
diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, sedangkan tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada tahun 2015-2017. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu statistik deskriptif dan path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka semakin turun tingkat kemiskinan. Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi dana desa maka akan semakin tinggi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat artinya semakin tinggi tingkat kemiskinan maka semakin menurun kesejahteraan masyarakat.

Serta penelitian terakhir dari Halulunga et al menganalisis pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap kemiskinan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel diperoleh dari gabungan data runtut waktu (*time series*) dan data beberapa objek dalam satu waktu (*cross section*). Data panel dalam penelitian ini ialah data Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Kemiskinan, dengan menggunakan 15 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2019 - 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini, maka Pemerintah diharapkan terus melanjutkan program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk mengentaskan Kemiskinan dan mengupayakan agar masyarakat tidak mengalami Kemiskinan kembali.

2.3. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka penelitian adalah keseluruhan kegiatan penelitian, mulai dari proses perencanaan dan perumusan masalah, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang kompleks. Kerangka penelitian ini digunakan untuk

lebih memudahkan arah dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Penelitian

Merujuk pada kerangka pemikiran konseptual pada gambar 2.1. dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo selama periode 2005 – 2023 dipengaruhi oleh jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial desa, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa. Alokasi dana ini bertujuan untuk menggerakkan sektor ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan usaha-usaha mikro/kecil di desa (misalnya melalui BUMDes, pertanian, kerajinan). Peningkatan aktivitas ekonomi lokal diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Teori LED berargumen bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari tingkat lokal, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di komunitas tersebut. Pemerintah daerah (dalam hal ini desa) berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dana Sarana Prasarana Sosial Desa sangat relevan dengan teori yang dikembangkan oleh ILO dan diusung oleh para ahli seperti Paul Streeten, teori ini

menekankan bahwa pembangunan harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar minimal masyarakat (makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan partisipasi).. Pembangunan infrastruktur sosial seperti posyandu, fasilitas air bersih, sanitasi, sekolah PAUD, atau balai pertemuan desa secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan pendapatan, peningkatan akses ini mengurangi beban pengeluaran (misalnya biaya pengobatan), meningkatkan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapabilitas produktif masyarakat dan mencegah mereka jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat merupakan dana langsung meningkatkan modal finansial. Dana tersebut didapatkan dari Dana Desa sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Peningkatan alokasi ini menunjukkan komitmen untuk memberdayakan desa dalam mengelola pembangunan dan mengurangi kemiskinan secara mandiri. Teori Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa pendelegasian wewenang fiskal (termasuk alokasi dana) dari pemerintah pusat ke unit pemerintah daerah (termasuk desa) dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Dengan Dana Desa, pemerintah desa lebih mampu mengidentifikasi dan merespons masalah kemiskinan yang spesifik di wilayahnya.

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara atau dugaan awal terhadap rumusan masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Hipotesis bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dikatakan sementara, karena pernyataan atau jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Oleh karena itu, setiap penelitian memiliki hipotesis terhadap masalah yang diteliti yang kemudian akan diuji lebih lanjut untuk menentukan apakah pernyataan atau jawaban tersebut benar adanya atau justru tidak terbukti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon progo tahun 2005 - 2023.

2. Diduga jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon progo tahun 2005 - 2023.
3. Diduga jumlah dana sarana prasarana sosial desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon progo tahun 2005 - 2023.
4. Diduga jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon progo tahun 2005 - 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yaitu pengukuran dengan menggunakan angka sebagai alat analisis untuk mengetahui kejadian yang sedang diteliti. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian empiris dimana data-data yang digunakan dalam bentuk angka atau data yang dapat diinterpretasikan dengan penafsiran angka, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder selain itu juga menggunakan artikel dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan kemiskinan, BUMDes, dan pemberdayaan masyarakat. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Glagah dan penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi, yaitu dampak BUMDes dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengurangan kemiskinan yang terjadi di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder sebagai sumber informasi. Menurut Sugiyono (2012), data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung, seperti data yang telah diolah dan disajikan oleh instansi dalam bentuk laporan atau dokumen resmi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data *time series* yakni periode 2005 hingga 2023. Data tersebut mencakup data jumlah penduduk miskin, data jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, data jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, data jumlah dana sarana prasarana sosial desa, serta data jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2005 – 2023. Sumber data:

- 1 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT): Informasi terkait perkembangan BUMDes, jumlah

BUMDes produktif, jenis usaha, dan kontribusi BUMDes terhadap ekonomi desa.

- 2 Laporan tahunan BUMDes yang mencakup pendapatan, pengeluaran, laba, dan investasi.
- 3 Laporan kegiatan dan program yang dijalankan oleh BUMDes.
- 4 Studi-studi akademis atau laporan penelitian yang terkait dengan BUMDes dan kemiskinan di desa.
- 5 Publikasi jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan.
- 6 Data program pemberdayaan ekonomi desa dari dinas terkait di tingkat kabupaten/kota.
- 7 Informasi mengenai dana desa dan alokasinya untuk BUMDes.

3.3. Alat Analisis

Penelitian ini menggunakan data *time series* yang diolah dengan menggunakan E-Views 12. Penelitian ini, menggunakan alat analisis *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Alasan peneliti *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) karena ARDL dapat digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek serta jangka panjang melalui uji kointegrasi *bound testing* antara dua atau lebih variabel. Selain itu, ARDL dapat digunakan tanpa harus memastikan bahwa semua variabel memiliki tingkat integrasi yang sama, sehingga lebih fleksibel dibandingkan metode lainnya.

Metode regresi ARDL merupakan model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang melalui *Bound Test Cointegration* antara variabel dependen dan variabel independen dalam suatu model regresi. Metode ini mengasumsikan bahwa suatu variabel dipengaruhi oleh variabel itu sendiri dari periode sebelumnya. Dalam konteks ekonomi, ketergantungan variabel dependen sangat jarang terjadi secara spontan. Seringkali variabel independen merespon variabel dependen dengan jeda waktu (*lag*). Apabila dalam suatu analisis regresi data *time series* terdapat variabel independen periode yang lalu maka metode analisis tersebut dinamakan *distributed-lag model*. Sedangkan apabila model tersebut memasukkan satu atau lebih variabel masa lalu

(baik dependen atau independen) di sisi kanan model tersebut dinamakan *autoregressive distributed lags*.

Metode ARDL yang dicetuskan oleh (Pesaran *et al.*, 2001) menggunakan pengujian keseimbangan jangka panjang melalui *Bound Test Cointegration*. Metode ARDL memiliki keunggulan utama dalam fleksibilitasnya karena dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel yang memiliki tingkat integrasi berbeda, yakni campuran antara $I(0)$ dan $I(1)$ namun tidak dapat digunakan pada tingkat $I(2)$. Selain itu ARDL tidak mempermasalahkan berapa banyak sampel yang diambil atau berapa banyak observasi yang dilakukan. Metode ARDL dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara kuantitatif dari tingkat suku bunga SBI (*sbi*), inflasi inti (*inf*), dan PDB atas dasar harga konstan (*lnpdb*) terhadap jumlah uang beredar (*lnm2*) yang fungsinya dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$\begin{aligned} JPM = & \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_1 JPM(t-i) + \sum_{i=1}^n \beta_2 PEP(t-i) + \sum_{i=1}^n \beta_3 PP(t-i) \\ & + \sum_{i=1}^n \beta_4 SPS(t-i) + \sum_{i=1}^n \beta_5 SPE(t-i) + \delta_1 JPM_t + \\ & \delta_2 PEP_t + \delta_3 PP_t + \delta_4 SPS_t + \delta_5 SPE_t + et \end{aligned}$$

Keterangan :

JPM _t	: Jumlah penduduk miskin (jiwa)
PEP _t	: Jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (rupiah)
PP _t	: Jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (rupiah)
SPS _t	: Jumlah dana sarana prasarana sosial desa (rupiah)
SPE _t	: Jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (rupiah)
JPM (t-i)	: Jumlah penduduk miskin (jiwa)
PEP (t-i)	: Jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (rupiah)
PP (t-i)	: Jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (rupiah)
SPS (t-i)	: Jumlah dana sarana prasarana sosial (rupiah)
SPE (t-i)	: Jumlah dana sarana prasarana ekonomi (rupiah)
β_0	: Intercept
$\beta_1, \dots, \beta_4$	: Dinamika hubungan jangka pendek

$\delta_1 \dots \delta_4$: Dinamika hubungan jangka panjang

et : Error term

1. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Stationer

Uji stationeritas merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data *time series* memiliki statistik seperti rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu. Pengujian stationeritas suatu data *time series* penting dilakukan karena metode analisis data *time series* membutuhkan data yang stationer. Jika data tidak stationer, hasil analisis dapat menjadi bias dan tidak valid. Pengujian stationeritas ini memiliki tujuan untuk mencegah penelitian mengalami regresi lancung. Regresi lancung merupakan keadaan dimana hasil regresi menunjukkan koefisien regresi yang signifikan secara statistik dan nilai koefisien determinasi yang tinggi namun hubungan antar variabel di dalam model tidak saling berhubungan (Widarjono, 2018).

Dalam penelitian ini uji stationeritas yang digunakan adalah uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF) dengan menggunakan *critical value* 5%. Kriteria suatu data dikatakan stationer adalah ketika nilai statistik ADF lebih besar dari nilai kritis tabel MacKinnon. Sedangkan jika nilai statistik ADF lebih kecil dari nilai kritis tabel MacKinnon maka data tersebut stationer. Selain itu juga dapat dilihat dari *p-value*, dimana jika *p-value* lebih kecil dari *critical value* 5% maka data sudah stationer. Namun jika *p-value* lebih besar dari *critical value* 5% data dikatakan tidak stationer dan perlu dilakukan pengujian pada tingkat *first difference*.

b. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara variabel dependen dan independen. Pengujian ini memiliki tujuan mengevaluasi apakah residual dari regresi memiliki hubungan kointegrasi atau tidak. Jika antara variabel independen dan variabel dependen saling terkointegrasi, berarti terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. Sebaliknya, jika tidak ada kointegrasi, maka variabel-variabel tersebut tidak memiliki keterkaitan jangka panjang.

Dalam penelitian ini uji kointegrasi menggunakan metode *Bound Testing Approach*. Metode ini digunakan untuk menguji keberadaan hubungan jangka panjang antara variabel independen yaitu tingkat suku bunga SBI (*sbi*), inflasi inti (*inf*), dan PDB atas dasar harga konstan (*lnpdb*) terhadap jumlah uang beredar (*lnm2*). Penggunaan uji kointegrasi menggunakan *Bound Test* memungkinkan pengujian tanpa harus memastikan apakah variabel-variabel yang digunakan bersifat stationer pada tingkat yang sama. Hasil uji *Bound Test* ditentukan berdasarkan perbandingan nilai F-statistik dengan nilai batas kritis yang diberikan oleh Pesaran *et al.*, (2001). Terdapat dua nilai batas dalam uji ini yaitu *lower bound* dan *upper bound*. Jika nilai F-statistik lebih kecil dari *lower bound*, maka tidak terdapat kointegrasi, yang berarti tidak ada hubungan jangka panjang antara variabel. Jika nilai F-statistik lebih besar dari *upper bound*, maka terdapat kointegrasi, menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang. Namun, jika nilai F-statistik berada di antara *lower bound* dan *upper bound*, maka keputusan ada atau tidaknya kointegrasi menjadi tidak meyakinkan.

c. Uji Stabilitas

Uji stabilitas CUSUM (*Cumulative Sum of Recursive Residuals*) dan CUSUMQ (*Cumulative Sum of Recursive Residuals of Squares*) digunakan untuk mengevaluasi stabilitas parameter dalam model ARDL. Uji CUSUM menguji perubahan parameter secara bertahap, sementara CUSUMQ lebih sensitif terhadap perubahan struktural yang tiba-tiba dalam varians residual. Hasil dari pengujian CUSUM dan CUSUMQ ditampilkan dalam bentuk grafik dengan garis utama (*cumulative sum*) dan dua batas kritis (*confidence bands*). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika garis CUSUM atau CUSUMQ tetap berada dalam batas kritis, maka model dianggap stabil. Namun, jika garis keluar dari batas kritis, maka terjadi ketidakstabilan parameter, yang mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam data atau ketidaksesuaian model yang digunakan.

3.3.2. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011) uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independent, atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai-nilai residual yang dihasilkan oleh model regresi tersebar secara simetris di sekitar nilai nol, membentuk pola seperti kurva lonceng (distribusi normal). Uji untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah menggunakan uji Jarque-Bera. Adapun hipotesis uji ini adalah sebagai berikut:

- 1) H_0 = residual berdistribusi normal
- 2) H_a = residual tidak berdistribusi normal

Dalam penelitian ini, data menggunakan taraf signifikansi sebesar 0.05. Oleh karena itu, jika nilai signifikansi dari uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih besar dari 0.05 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi terdapat korelasi antara variabel independent. Menurut Ghosali (2011) model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independent. Pengajian ini biasanya dilakukan dengan Menggunakan suatu program pengolahan data yang menyediakan *Collinearity Diagnosis*.

Hasil dari uji multikolinieritas ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Nilai Tolerance Variabel independent: jika nilai tolerance dari setiap variabel independent lebih besar dari 0.10 maka menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak terlalu berkorelasi dengan variabel independent lainnya. Ini berarti tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi.
- b. Nilai Variance Inflation Factor (VIF): jika nilai VIF dari setiap variabel independent kurang dari 10 hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel independent dalam model regresi. Nilai VIF yang rendah menunjukkan bahwa varians dari koefisien regresi

untuk variabel independent tidak terlalu besar.

Dengan demikian, jika kedua kondisi tersebut terpenuhi (nilai tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10) untuk setiap variabel independent dalam model regresi maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel independent.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakseimbangan Variance dari residual antar pengamatan. Menurut Ghosali (2011) model ARDL yang baik, error seharusnya memiliki pola yang konstan atau disebut homoskedastisitas. Sedangkan jika error berubah-ubah maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Kondisi model ARDL yang mengalami gejala heteroskedastisitas menyebabkan estimasi yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Hal ini dikarenakan standar error dari koefisien regresi menjadi bias. Akibatnya, uji t dan uji F yang digunakan untuk menilai signifikansi variabel independen menjadi tidak valid, karena standar error yang salah akan menghasilkan nilai *p-value* yang tidak benar sehingga menyebabkan kesimpulan yang keliru. Uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak dalam penelitian ini adalah menggunakan metode uji *Breusch-Pagan-Godfrey* dengan bantuan *E-Views 12*. Menurut (Evanty, 2023) untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dalam data time series, dapat digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari 0,05 (Prob > 0,05), maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari 0,05 (Prob < 0,05), maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (*time series*) atau ruang (*cross-section*) dalam model ARDL. Autokorelasi menunjukkan bahwa observasi pada suatu periode dipengaruhi oleh observasi pada periode

sebelumnya, sehingga data tidak independen. Jika terjadi autokorelasi, maka estimasi koefisien regresi menjadi bias dan tidak efisien, sehingga kesimpulan yang ditarik mungkin tidak valid. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang merupakan salah satu yang paling umum digunakan untuk menguji autokorelasi dalam data time series. Jika nilai Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test menunjukkan adanya autokorelasi, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti transformasi data atau menggunakan metode estimasi yang lebih tepat. Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* lebih besar dari 0,05 ($Chi-Square > 0,05$), maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
- b. Jika nilai probabilitas *Chi-Square* kurang dari 0,05 ($Chi-Square < 0,05$), maka terdapat gejala autokorelasi.

3.3.3. Uji Statistik

1. Uji t

Uji t memiliki kesamaan dengan uji koefisien regresi dalam bentuk konteks analisis regresi. Uji t digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh secara parsial antara variabel independent (masing-masing) terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda (Taufiqur, 2018). Dengan kata lain, uji t dalam regresi linear berganda bertujuan untuk menilai kecocokan parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang digunakan untuk mengestimasi persamaan atau model linear berganda. Validitas parameter ini ditentukan oleh kemampuannya untuk menjelaskan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen. Parameter yang diestimasi dalam regresi linear meliputi konstanta (intersep) dan koefisien (slop) dalam persamaan linear.

Dalam penelitian ini, uji t dilakukan dengan menggunakan program E-Views 12. Ketentuan yang digunakan adalah apabila nilai probabilitas lebih kecil dari pada 0.05 maka koefisien regresi signifikan, dan Apabila nilai probabilitas lebih

besar 0.05 maka koefisien regresi tidak signifikan. Adapun hipotesis yang akan digunakan dalam pengajian ini sebagai berikut:

- a. $H_0: \beta_1 = 0$ maka jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Galgah
 $H_1: \beta_1 < 0$ maka jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah.
- b. $H_0: \beta_2 = 0$ maka jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah
 $H_1: \beta_2 < 0$ maka jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat dalam mengelola DD berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah.
- c. $H_0: \beta_3 = 0$ maka jumlah dana sarana prasarana sosial desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah
 $H_1: \beta_3 < 0$ maka jumlah dana sarana prasarana sosial desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah.
- d. $H_0: \beta_4 = 0$ maka jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah
 $H_1: \beta_4 < 0$ maka jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah.

Pengujian hipotesis ini juga dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} . Proses pengambilan keputusan dalam uji ini dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Jika nilai $-t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial desa, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.
- b. Jika nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial

desa, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

2. Uji F

Uji F bertujuan sebagai penentu apakah terdapat pengaruh Bersama-sama antar variabel independent dengan variabel dependen dalam model regresi (Taufiqur, 2018). Uji F juga dikenal sebagai uji keterandalan model atau uji kelayakan model. Uji F merupakan Langkah awal dalam mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak. “Layak” disini merujuk pada model yang dapat digunakan secara efektif untuk menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

- a. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ (Prob $< 0,05$), maka seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model yang digunakan dianggap sesuai (fit).
- b. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ (Prob $> 0,05$), maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Akibatnya, model yang digunakan dianggap tidak sesuai (tidak fit).

Dalam penelitian ini, uji F dilakukan Menggunakan Analisis Varians (ANOVA) yang menggunakan program EViews 12. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas F hitung (output dalam kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi dinyatakan layak. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas F hitung lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

- a. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan (H_a) ditolak, yang berarti bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial desa, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

- b. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan (H_a) diterima, yang berarti bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat, jumlah dana sarana prasarana sosial desa, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa memiliki pengaruh secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

3. Koefisien Determinasi

Menurut Taufiqur (2018) uji ini mengukur sejauh mana variabel independent mempengaruhi variabel dependen. Koefisien determinasi menjelaskan variasi berpengaruh terhadap variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Ataupun dapat dikatakan sebagai porposi pengaruh seluruhnya pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam program E-Views 12 nilai koefisien determinasi (R^2) ditunjukkan oleh nilai *R Square* atau *Adjusted R-Square* yang digunakan pada saat variabel bebas hanya satu saja (dapat disebut dengan regresi linear sederhana), sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari 1.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono, (2012) definisi operasional variabel penelitian merujuk pada elemen atau nilai yang berasal dari suatu objek atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu, yang kemudian ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan objek serta metode penelitian yang diterapkan, berikut disajikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini:

1. Jumlah Penduduk Miskin

Merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non-makanan yang bersifat dasar. kemiskinan mencakup kondisi kelaparan, kekurangan perawatan kesehatan, dan tidak adanya tempat tinggal. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan

berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan Makanan yaitu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan yaitu nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan pokok bukan makanan (seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan). Kemiskinan yang digunakan ialah data jumlah penduduk miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 – 2023 dalam satuan jiwa yang diperoleh dari kantor Desa Glagah.

2. Jumlah Dana Permodalan dan Ekonomi Produktif

Merupakan pemberian dana atau fasilitas pembiayaan kepada usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok usaha bersama yang menangani kemiskinan. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Dana permodalan dan ekonomi produktif didapat dari dana desa dan dana sumbangan yang telah diberikan serta pembagiannya dilihat melalui banyaknya masyarakat yang berpartisipasi serta merupakan golongan masyarakat tidak mampu. Jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif yang telah dikeluarkan untuk mendukung kegiatan BUMDes di Desa Glagah meliputi produksi olahan cabai bubuk, tepung ikan, dan pariwisatanya yaitu pantai Glagah Indah. Data jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif dalam satuan rupiah ini diperoleh dari kantor Desa Glagah tahun 2005 - 2023.

3. Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Merupakan dana untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan pengembangan BUMDes. Dana Desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur desa, yang secara tidak langsung dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat. Dana peningkatan Pendapatan masyarakat didapat dari dana desa yang telah diberikan pemerintah serta pembagiannya dilihat melalui banyaknya masyarakat yang berpartisipasi serta merupakan golongan masyarakat tidak

mampu yang dikelola untuk memberikan dukungan dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengelola produksi olahan cabai bubuk, trepung ikan, dan pariwisatanya. Data jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat dalam satuan rupiah ini diperoleh dari kantor Desa Glagah tahun 2005 - 2023.

4. Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa

Merupakan dana yang dikeluarkan untuk fasilitas pendukung dalam kehidupan sosial seperti balai desa, tempat ibadah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat rekreasi. Fasilitas ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memfasilitasi kegiatan sosial. Dana sarana prasarana sosial desa didapat dari dana desa dan dana sumbangan yang telah diberikan serta pembagiannya dilihat melalui banyaknya masyarakat yang berpartisipasi serta merupakan golongan masyarakat tidak mampu. Jumlah dana sarana prasarana sosial desa ini dikeluarkan untuk keperluan kebersihan fasilitas kehidupan sosial seperti pemberian gaji untuk tukang berbersih di balai desa. Data jumlah dana sarana prasarana sosial desa dalam satuan rupiah ini diperoleh dari kantor Desa Glagah tahun 2005 - 2023.

5. Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa

Merupakan dana yang dikeluarkan untuk fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi di desa seperti pasar, toko, jalan, air bersih, dan listrik. Dana sarana prasarana ekonomi desa didapat dari dana desa dan dana sumbangan yang telah diberikan serta pembagiannya dilihat melalui banyaknya masyarakat yang berpartisipasi serta merupakan golongan masyarakat tidak mampu. Data jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa dalam satuan rupiah ini diperoleh dari kantor Desa Glagah tahun 2005 - 2023.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Jumlah Penduduk Miskin

Desa Glagah, yang terletak di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, menghadapi dinamika kemiskinan yang kompleks dan berfluktuasi. Meskipun secara umum angka kemiskinan di tingkat nasional dan daerah telah menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Glagah memiliki karakteristik unik yang memengaruhi kondisi sosial ekonominya. Sebagai desa pesisir yang juga menjadi lokasi pengembangan proyek strategis nasional seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), Glagah mengalami transformasi yang tidak selalu membawa dampak merata bagi seluruh penduduknya.

Tabel 4.1 Data Penduduk Miskin Desa Glagah
Tahun 2005 – 2023 (jiwa)

Tahun	JPM	Presentase
2005	486	15,96%
2006	540	17,73%
2007	505	16,58%
2008	507	16,65%
2009	463	15,21%
2010	431	14,16%
2011	406	13,33%
2012	470	15,43%
2013	513	16,84%
2014	529	17,37%
2015	547	17,96%
2016	554	18,19%
2017	713	23,41%
2018	738	24,23%
2019	634	20,82%
2020	625	20,52%
2021	584	19,17%
2022	532	17,47%
2023	470	15,43%

Sumber: Database web Kelurahan Glagah

Berdasarkan table 4.1. diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Glagah pertahunnya mengalami fluktuasi yang tajam, terutama lonjakan pada 2017-2018, mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal atau perubahan kondisi yang sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penurunan berkelanjutan pasca 2018 hingga 2023 adalah indikator positif dan menunjukkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan berhasil melampaui level 2005 pada tahun 2023. Pada awal periode, terlihat tren penurunan yang cukup konsisten baik pada jumlah penduduk miskin maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin turun dari 486 (15,96%) pada 2005 menjadi 406 (13,33%) pada 2011. Ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan di awal dekade. Kemudian pada tahun 2011, tren berbalik arah secara signifikan. Jumlah penduduk miskin dan persentasenya mulai meningkat kembali, mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan angka 738 (24,23%). Kenaikan ini sangat tajam, terutama dari 2016 (554; 18,19%) ke 2017 (713; 23,41%), dan berlanjut ke 2018. Periode ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, atau bahkan peristiwa spesifik yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Setelah mencapai puncak di 2018, data menunjukkan adanya penurunan yang stabil dan signifikan kembali. Jumlah penduduk miskin turun dari 738 (24,23%) pada 2018 menjadi 470 (15,43%) pada 2023. Penurunan ini cukup impresif, bahkan angka di tahun 2023 kembali mendekati (dan sedikit lebih rendah dari) angka pada tahun 2005. Yang menarik, meskipun terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021 yang secara umum berdampak pada peningkatan kemiskinan, data pada tabel ini tetap menunjukkan penurunan di tahun-tahun tersebut (2020: 625/20,52%, 2021: 584/19,17%) setelah puncak di 2018. Ini bisa mengindikasikan adanya kebijakan mitigasi yang kuat atau resiliensi masyarakat di wilayah tersebut.

4.1.2. Dana Desa

Berdasarkan data monografi Desa Glagah tahun 2020, Desa Glagah merupakan daerah pantai dengan ketinggian 5-7 mdpl dengan tingkat kemiringan 0-1%. Suhu udara di Desa Glagah kurang lebih 30° C dan curah hujan rata-rata

setiap tahun 2.342 mm/tahun sehingga lahan di daerah tersebut dapat dibedakan ke beberapa penggunaan. Penggunaan lahannya terbagi dalam beberapa kategori, antara lain lahan permukiman, lahan untuk fasilitas umum, lahan pertanian yang terdiri dari tegalan dan sawah, serta lahan untuk keperluan lain. Dari penggunaan lahan tersebut masyarakat memanfaatkan lahan yang bertujuan untuk meratakan pendapatan sehingga terbentuk BUMDes sebagai wadah masyarakat yang berpendapatan rendah untuk berkontribusi. Di BUMDes ini, mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk dana untuk menunjang kegiatan tersebut.

Tabel 4.2
Jumlah Dana Permodalan dan Ekonomi Produktif
Tahun 2005 – 2023 (rupiah)

Tahun	Permodalan dan Ekonomi Produktif
2005	Rp6.118.500
2006	Rp6.750.000
2007	Rp7.305.000
2008	Rp8.916.000
2009	Rp9.165.000
2010	Rp11.413.000
2011	Rp14.625.000
2012	Rp17.320.000
2013	Rp23.303.000
2014	Rp27.499.000
2015	Rp35.122.000
2016	Rp55.710.000
2017	Rp71.800.000
2018	Rp130.205.000
2019	Rp164.484.000
2020	Rp150.512.000
2021	Rp188.742.000
2022	Rp200.662.000
2023	Rp230.266.000

Sumber: Database web Kelurahan Glagah

Berdasarkan tabel 4.2. diatas dapat dilihat bahwa dana yang telah dikeluarkan BUMDes untuk kegiatan permodalan dan ekonomi produktif di Desa Glagah pada tahun 2005 – 2023 meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, meskipun ada beberapa fluktuasi. Ini mengindikasikan adanya upaya atau

keberhasilan dalam meningkatkan modal dan aktivitas ekonomi produktif selama periode tersebut. Sementara itu, table menunjukkan pada tahun 2018 hingga 2022 merupakan pengeluaran dana terbesar yang BUMDes alami mengingat ditahun tersebut telah terjadi kasus penggusuran lahan sebagai bandara dan ditahun 2019 terjadi kasus Covid-19 yang menyebabkan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaannya dan perekonomian yang sulit bergerak. Kemudian ditahun 2023 mulai kembalinya produktifitas sehingga Peningkatan ini kemungkinan besar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di wilayah desa Glagah karena mulai terkondusifnya masyarakat Desa Glagah yang kehilangan pekerjaan serta ekonomi yang berangsur-angsur kondusif mengingat lahan kembali membaik dan perekonomian kembali berputar.

Tabel 4.3
Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Tahun 2005 – 2023 (rupiah)

Tahun	Peningkatan Pendapatan
2005	Rp16.000.000
2006	Rp19.500.000
2007	Rp22.800.000
2008	Rp29.000.000
2009	Rp36.950.000
2010	Rp40.000.000
2011	Rp48.700.000
2012	Rp54.300.000
2013	Rp59.800.000
2014	Rp67.000.000
2015	Rp71.200.000
2016	Rp82.000.000
2017	Rp89.600.000
2018	Rp92.700.000
2019	Rp97.450.000
2020	Rp100.200.000
2021	Rp123.600.000
2022	Rp170.300.000
2023	Rp214.000.000

Sumber: Database web Kelurahan Glagah

Berdasarkan tabel 4.3. diatas dapat dilihat bahwa dana yang telah dikeluarkan BUMDes untuk kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dalam mengelola DD di Desa Glagah pada tahun 2005 – 2023 menunjukan tren peningkatan pendapatan yang konsisten dan signifikan sehingga mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau keberhasilan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan selama periode ini. Pengeluaran dana tahun 2005 – 2017 memperlihatkan rata – rata pertumbuhan dalam fase awal yang sehat dan terkendali karena masyarakat memiliki pendapatan yang stabil mengingat bahwa ditahun tersebut jumlah kemiskinan cenderung kecil. Namun dimulai dari tahun 2018 – 2023 terjadi pengeluaran yang tinggi atau mengalami lonjakan mengingat ditahun tersebut telah terjadi kasus penggusuran lahan sebagai bandara dan ditahun 2019 terjadi kasus Covid-19 sehingga masyarakat berpangku tangan terhadap pemerintah.

Tabel 4.4
Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa
Tahun 2005 – 2023 (rupiah)

Tahun	Sarana Prasarana Sosial
2005	Rp550.000
2006	Rp600.000
2007	Rp650.000
2008	Rp750.000
2009	Rp900.000
2010	Rp1.000.000
2011	Rp1.050.000
2012	Rp1.150.000
2013	Rp1.150.000
2014	Rp1.250.000
2015	Rp1.250.000
2016	Rp1.300.000
2017	Rp1.300.000
2018	Rp1.450.000
2019	Rp1.450.000
2020	Rp1.550.000
2021	Rp1.650.000
2022	Rp1.650.000
2023	Rp1.800.000

Sumber: Database web Kelurahan Glagah

Berdasarkan table 4.4. diatas dapat dilihat bahwa dana yang telah dikeluarkan BUMDes untuk kegiatan sarana prasaran soaial di Desa Glagah pada tahun 2005 – 2023 menunjukkan kenaikan yang konsisten (stabil) setiap tahunnya disesuaikan dengan keperluan masyarakat dalam kegiatan sarana prasarana sosial ini. Stagnasi ini bisa mengindikasikan prioritas pembangunan dialihkan ke sektor lain untuk sementara, kemudian anggaran yang tetap atau terbatas untuk sarana prasarana sosial dalam tahun-tahun tersebut, dan berfokus pada pemeliharaan daripada pembangunan baru. Dibandingkan dengan data ekonomi produktif dan pendapatan yang menunjukkan pertumbuhan eksponensial, pertumbuhan sarana prasarana sosial ini lebih linear dan lambat karena dana yag dikeluarkan merupakan dana gaji untuk petugas kebersihan. Ini wajar, mengingat pembangunan infrastruktur seringkali membutuhkan investasi besar yang tidak selalu dilakukan setiap tahun, melainkan secara bertahap atau sesuai kebutuhan mendesak.

Tabel 4.5
Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa
Tahun 2005 – 2023 (rupiah)

Tahun	Sarana Prasarana Ekonomi
2005	Rp1.380.000
2006	Rp1.540.000
2007	Rp1.950.000
2008	Rp2.000.000
2009	Rp2.430.000
2010	Rp2.870.000
2011	Rp3.100.000
2012	Rp3.650.000
2013	Rp5.250.000
2014	Rp6.000.000
2015	Rp6.700.000
2016	Rp8.000.000
2017	Rp8.500.000
2018	Rp9.100.000
2019	Rp9.800.000
2020	Rp10.000.000
2021	Rp10.000.000
2022	Rp10.200.000
2023	Rp11.400.000

Sumber: Database web Kelurahan Glagah

Berdasarkan table 4.5. diatas dapat dilihat bahwa dana yang telah dikeluarkan BUMDes untuk kegiatan sarana prasarana ekonomi di Desa Glagah pada tahun 2005 – 2023 konsisten (stabil) meskipun ditahun 2017 hingga 2021 telah terjadi kasus penggusuran lahan sebagai bandara dan ditahun 2019 terjadi kasus Covid-19 yang menyebabkan perekonomian yang sulit bergerak. Namun investasi ekonomi masih berjalan dengan baik dengan adanya modal, regulasi, inovasi, dan sumber daya manusia yang masih dapat bergerak dengan lingkup yang minim. Peningkatan sarana prasarana ekonomi (seperti jalan yang lebih baik untuk transportasi hasil pertanian/perikanan, pasar yang lebih baik, atau fasilitas irigasi) kemungkinan besar berkorelasi positif dengan peningkatan permodalan ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan yang kita analisis sebelumnya. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Hasil Persyaratan Analisis

1. Uji Stasioneritas

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pengujian dengan metode ARDL adalah melakukan uji stationeritas. Pada penelitian ini, uji stationeritas dilakukan dengan uji akar unit (*unit root test*) yang dikemukakan oleh David Dickey dan Wayne Fuller, yaitu Uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Hasil Uji ADF dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Stasioner Augmented Dickey-Fuller Tingkat Level

Variabel	Nilai ADF	Critical Value MacKinnon 5%	Probabilitas	Keterangan
JPM	-1.356021	-3.040391	0.5798	Tidak Stasioner
PEP	1.768838	-3.040391	0.9993	Tidak Stasioner
PP	-2.954776	-3.040391	0.0587	Tidak Stasioner
SPS	0.758348	-3.040391	0.9899	Tidak Stasioner
SPE	-3.100929	-3.052169	0.0457	Stasioner

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 2)

Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji akar unit menggunakan metode ADF pada tingkat level. Berdasarkan hasil tersebut, semua variabel memiliki nilai ADF *absolut* yang lebih kecil dari nilai *absolut critical value* Mackinnon dengan taraf signifikasi 5%. Selain itu, probabilitas masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang berarti terdapat akar unit dalam data atau data tidak stationer dalam tingkat level dan perlu dilanjutkan dengan uji stationeritas pada tingkat *first difference*.

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji akar unit menggunakan metode ADF pada tingkat *first difference*. Berdasarkan hasil tersebut, semua variabel memiliki nilai ADF *absolut* yang lebih besar dari nilai *absolut critical value* Mackinnon dengan taraf signifikasi 5%. Selain itu, probabilitas dari semua variabel lebih kecil dari 0,05 yang berarti tidak terdapat akar unit dalam data atau dengan kata lain data bersifat stationer dalam tingkat *first difference*.

Tabel 4.7

Hasil Uji Stasioner Augmented Dickey-Fuller Tingkat Level *First Difference*

Variabel	Nilai ADF	Critical Value MacKinnon 5%	Probabilitas	Keterangan
JPM	-3.099718	-3.052169	0.0458	Stasioner
PEP	-6.742559	-3.052169	0.0000	Stasioner
PP	-6.327466	-3.052169	0.0001	Stasioner
SPS	-4.144506	-3.052169	0.0060	Stasioner
SPE	-	-	-	-

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 3)

2. Lag Optimum

Langkah selanjutnya dalam estimasi model ARDL adalah menentukan *lag* optimum. Pemilihan *lag* optimal bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana perubahan dalam suatu variabel memengaruhi variabel lainnya dalam jangka pendek. Dalam menentukan panjang *lag* optimum, penelitian ini menggunakan pendekatan *Akaike Info Criterion* (AIC). Tabel 4.8 menunjukkan hasil pemilihan lag optimum dalam estimasi model ARDL berdasarkan *Akaike Information Criterion* (AIC). Model dengan nilai AIC terendah dianggap sebagai model yang

paling optimal karena dapat menjelaskan hubungan antar variabel dengan lebih baik. Hasil estimasi, model ARDL (3, 2, 3, 3) memiliki nilai AIC terendah sebesar -5,708904, sehingga dipilih sebagai model terbaik untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

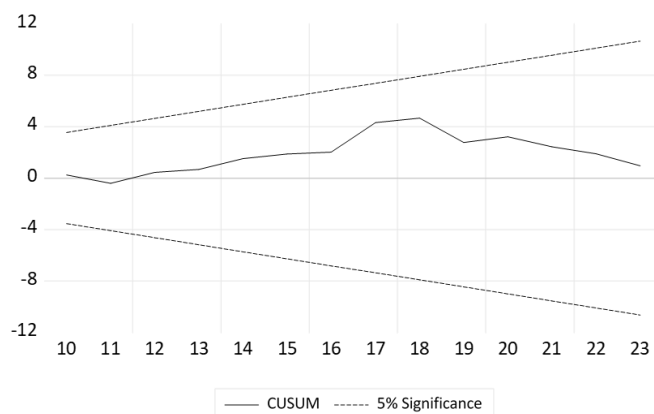
Tabel 4.8 Panjang Lag Optimum

Model	AIC*	Specification
182	-5.708904	ARDL(3, 2, 3, 3)
132	-5.698403	ARDL(3, 4, 3, 3)
7	-5.696311	ARDL(4, 4, 3, 3)
57	-5.678134	ARDL(4, 2, 3, 3)
181	-5.656286	ARDL(3, 2, 3, 4)
157	-5.648653	ARDL(3, 3, 3, 3)
177	-5.646002	ARDL(3, 2, 4, 3)
6	-5.639381	ARDL(4, 4, 3, 4)
131	-5.637120	ARDL(3, 4, 3, 4)
127	-5.635525	ARDL(3, 4, 4, 3)

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 4)

3. Uji Stabilitas

Uji stabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa estimasi model ARDL stabil. Pengujian stabilitas model ARDL ini dilakukan dengan melihat diagram *Cumulative Sum of Recursive Residuals* (CUSUM) dan *Cumulative Sum of Recursive Residuals of Squares* (CUSUMQ) yang terlihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut.

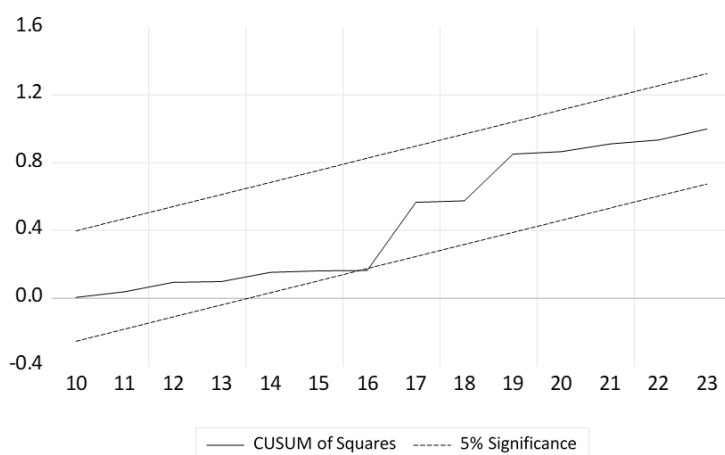


Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 8)

Gambar 4.1 Diagram CUSUM

Gambar 4.1 merupakan diagram CUSUM yang menunjukkan bahwa garis

kumulatif residual (garis CUSUM) tetap berada dalam batas signifikan 5% yang menandakan bahwa parameter model ARDL stabil selama periode 2005 sampai dengan 2023. Stabilitas ini mengindikasikan tidak adanya perubahan struktural yang signifikan dalam hubungan antar variabel, sehingga model dianggap stabil.



Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 9)

Gambar 4.2 Diagram CUSUM Test

Gambar 4.2 merupakan diagram CUSUM test yang menunjukkan bahwa garis biru tetap berada di dalam batas signifikan 5%, yang berarti variasi kesalahan dalam model tetap stabil dari tahun 2005 hingga 2023. Hal ini menandakan bahwa tidak ada perubahan besar dalam pola data, sehingga model yang digunakan dapat dianggap konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis.

4. Estimasi Moodel Jangka Pendek

Tabel 4.9 menunjukkan hasil estimasi model *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) jangka pendek.

Tabel 4.9 Hasil Estimasi ARDL Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	Standar Error	t-Statistic	Probabilitas
D(PEP,2)	-0.005221	0.004386	-1.190265	0.2503
D(PEP(-1))	-0.013040	0.004201	3.103983	0.0064
D(PP)	0.015962	0.010687	1.493590	0.1536
D(PP(-1))	-0.070793	0.017286	-4.095380	0.0008
D(SPS)	-1.250078	1.642304	-0.761173	0.4714
D(SPS(-1))	1.266358	1.827599	0.692908	0.0021
D(SPS(-2))	0.035777	0.009641	3.711093	0.0017
D(SPE)	0.033152	0.124027	0.267294	0.7925
D(SPE(-1))	0.549478	0.106276	5.170303	0.0001
D(SPE(-2))	0.365259	0.099890	3.656614	0.0020

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 5)

Hasil estimasi model ARDL jangka pendek menunjukkan bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif berpengaruh negatif signifikan pada lag ke-1, jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat berpengaruh negatif signifikan pada lag ke-1, jumlah dana sarana prasarana sosial desa berpengaruh positif signifikan pada lag ke-1 dan ke-2, dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi berpengaruh positif signifikan pada lag ke-1 dan lag ke-2 terhadap jumlah penduduk miskin di desa Glagah.

5. Uji Kointegrasi *Bound Test*

Tahap berikutnya adalah uji kointegrasi untuk mengetahui apakah terdapat atau tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. Pada penelitian ini pengujian kointegrasi menggunakan metode *bound test* karena dalam pengujian stationeritas terdapat variabel yang stationer pada tingkat level dan variabel yang stationer pada tingkat *first difference*.

Tabel 4.10 Hasil Uji Kointegrasi Bound Test

Test Statistic	Value	K
F-Statistic	7,066287	3
Critical Value Bounds		
Significance	I0 (Lower Bound)	I1 (Upper Bound)
10%	2.37	3.2
5%	2.79	3.67
2.5%	3.15	4.08
1%	3.65	4.66

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 6)

Hasil uji kointegrasi berdasarkan pendekatan *bound test* pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai F-statistik sebesar 7,066287 lebih besar dibandingkan *lower bound* dan *upper bound* pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Dimana *lower bound* pada tingkat signifikansi 5% sebesar 2,79 dan *upper bound* pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kointegrasi atau hubungan jangka panjang antar variabel.

6. Estimasi Model Jangka Panjang

Tabel 4.11 Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
PEP	-0.006756	0.002953	-2.288042	0.0352
PP	0.055427	0.020074	2.761144	0.0134
SPS	-0.410955	0.193426	-2.124612	0.0586
SPE	0.039158	0.042010	2.455049	0.6629
C	0.025173	0.002322	10.83882	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 7)

Hasil estimasi model jangka panjang yang ditunjukkan dalam tabel 4.10 menyatakan bahwa variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif dan jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat pengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap variabel jumlah penduduk miskin sedangkan jumlah dana sarana prasarana sosial desa dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi memiliki tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang terhadap variabel jumlah penduduk miskin.

Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas dari variabel *PEP* dan *PP* yang lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$.

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menuji apakah variabel dependent dan variabel independent memiliki distribusi yang normal atau tidak. Nilai dikatakan berdistribusi normal atau lolos uji normalitas apabila nilai *probability Jarque-Bara* lebih besar dari 0.05. Hasil dari uji Normalitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.12

Hasil Pengujian Normalitas

Probability Jarque-Bara	0.367438
--------------------------------	----------

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 10)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat diketahui bahwa nilai *probability Jarque-Bara* sebesar 0.367438 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal (lolos uji normalitas) dan telah memenuhi syarat normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan pengujian didalam model regresi apakah ditemukannya korelasi diantara variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Adapun variabel bebas yang dinyatakan bebas dari segala multikolinieritas Apabila nilai korelasi yang dihasilkan kurang dari 10.00. Hasil dari uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.13

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(JPM(-1))	0,043605	6,284407	2,237487
D(JPM(-2))	0,039038	5,840557	1,940412
D(PEP)	3,19E-05	1,886076	1,869754
D(PEP(-1))	4,01E-05	2,358008	2,330018
D(PP)	0,000208	4,768419	4,764706
D(PP(-1))	0,000270	4,097868	4,045825
D(SPS)	0,001990	6,160377	4,751105
D(SPS(-1))	0,002907	1,389410	4,884394
D(SPS(-2))	0,000331	4,484188	4,477400
D(SPE)	0,033499	5,237578	4,442337
D(SPE(-1))	0,027314	4,326876	3,763468
D(SPE(-2))	0,030965	5,087876	4,376285
C	0,000113	26,40317	NA

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-13 (Lampiran 11)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian multikolinearitas masing-masing nilai korelasi antar variabel independent (bebas) kurang dari 10.00. dengan demikian kesimpulannya bahwa antar variabel bebas uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* untuk mengetahui apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atau tidak. Hasil pengujian dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas jika nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05).

Tabel 4.14
Hasil Pengujian Heterokedastisitas

F-statistic	1.509051	Prob. F(14,17)	0.2083
Obs*R-squared	17.73179	Prob. Chi-Square(14)	0.2193
Scaled explained SS	3.607768	Prob. Chi-Square(14)	0.9974

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 12)

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menghasilkan probabilitas *chi-square* sebesar 0,2193 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARDL tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* untuk mengetahui apakah terdapat gejala autokorelasi dalam model ARDL atau tidak. Hasil pengujian dapat disimpulkan tidak mengalami gejala autokorelasi adalah jika nilai probabilitas *chi-square* lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% (0,05). Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation* menghasilkan probabilitas *chi-square* sebesar 0,4227 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model ARDL tidak memiliki masalah autokorelasi.

Tabel 4.15
Hasil Pengujian Autokorelasi

F-statistic	0.426600	Prob. F(2,15)	0.6604
Obs*R-squared	1.722200	Prob. Chi-Square(2)	0.4227

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 13)

4.2.3. Hasil Uji Statistik

1. Uji t

Uji t dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel *PEP*, *PP*, *SPS*, dan *SPE* secara parsial atau terpisah terhadap variabel *JPM*. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, dan perhitungan $df = (n-k)$, $df = (19-5) = 14$, sehingga diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,761. Dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.16
Hasil Pengujian t Jangka Pendek

Variabel	Coefficient	t-Statistic	t-tabel	Keterangan
D(PEP)	-0.005221	-1.190265	-1,761	Tidak signifikan
D(PEP(-1))	-0.013040	3.103983	-1,761	Signifikan
D(PP)	0.015962	1.493590	-1,761	Tidak signifikan
D(PP(-1))	-0.070793	-4.095380	-1,761	Signifikan
D(SPS)	-1.250078	-0.761173	-1,761	Tidak signifikan
D(SPS(-1))	1.266358	0.692908	-1,761	Signifikan
D(SPS(-2))	-0.035777	-3.711093	-1,761	Signifikan
D(SPE)	0.033152	0.267294	-1,761	Tidak signifikan
D(SPE(-1))	0.549478	5.170303	-1,761	Signifikan
D(SPE(-2))	0.365259	3.656614	-1,761	Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 4)

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pada variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (PEP) memiliki nilai t-statistik sebesar -1,190265 > t-tabel sebesar -1,761 dengan nilai koefisien sebesar -0.005221, sehingga gagal menolak H_0 yang berarti dalam jangka pendek, PEP tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel *PEP(-1)* memiliki nilai t-statistik sebesar -3.103983 < t-tabel -1,761 dengan nilai koefisien sebesar -0.013040, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif sebelumnya *PEP(-1)* berpengaruh negatif signifikan

terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif sebesar 1 juta rupiah pertahunnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin pertahunnya sebesar 0,013040 atau sebaliknya.

- 2) Pada variabel jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (PP) memiliki nilai t-statistik sebesar $1,493590 > t\text{-tabel sebesar } -1,761$ dengan nilai koefisien sebesar 0,005430, sehingga gagal menolak H_0 yang berarti dalam jangka pendek, PP tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel $PP(-1)$ memiliki nilai t-statistik sebesar $4,095380 > t\text{-tabel } -1,761$ dengan nilai koefisien $-0,070793$, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, $PP(-1)$ berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1 juta rupiah pada satu tahun sebelumnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 0,070793 jiwa dan sebaliknya.
- 3) Pada variabel jumlah dana sarana prasarana sosial desa (SPS) memiliki nilai t-statistik sebesar $-0,761173 > t\text{-tabel sebesar } -1,761$ dengan nilai koefisien sebesar $-1,250078$, sehingga gagal menolak H_0 yang berarti dalam jangka pendek, SPS tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel $SPS(-1)$ memiliki nilai t-statistik sebesar $0,692908 > t\text{-tabel } -1,761$ dengan nilai koefisien $1,266358$, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, $SPS(-1)$ berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1 juta rupiah pada satu tahun sebelumnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 0,070793 jiwa dan sebaliknya. Variabel SPS dua tahun sebelumnya $SPS(-2)$ memiliki nilai t-statistik sebesar $3,711093 > t\text{-tabel } -1,761$ dengan nilai koefisien $-0,035777$, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, $SPS(-2)$ berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan jumlah dana sarana prasarana sosial desa sebesar 1 juta rupiah pada dua tahun

sebelumnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 0,035777 jiwa atau sebaliknya.

- 4) Pada variabel jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (SPE) memiliki nilai t-statistik sebesar 0,267294 > t-tabel sebesar -1,761 dengan nilai koefisien sebesar 0,033152, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, SPE berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Variabel SPE satu tahun sebelumnya ($SPE(-1)$) memiliki nilai t-statistik sebesar 5,170303 > t-tabel 1,761 dengan nilai koefisien 0,549478, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, SPE satu tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa sebesar 1 juta rupiah pada satu tahun sebelumnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 0,549478 jiwa dan sebaliknya. Variabel SPE dua tahun sebelumnya ($SPE(-2)$) memiliki nilai t-statistik sebesar 3,656614 > t-tabel -1,761 dengan nilai koefisien 0,0365259, sehingga H_0 ditolak yang berarti dalam jangka pendek, SPE dua tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya, kenaikan SPE sebesar 1 juta rupiah pada dua tahun sebelumnya akan menurunkan jumlah penduduk miskin saat ini sebesar 0,365259 jiwa atau sebaliknya.

Berdasarkan hasil pada tabel 4.17, uji signifikansi t dalam jangka panjang diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Uji t Jangka Panjang

Variabel	Coefficient	t-Statistic	t-Tabel	Keterangan
PEP	-0.006756	-2,288042	1,761	Signifikan
PP	0,055425	2,761144	1,761	Signifikan
SPS	-0,410955	-2,124612	1,761	Signifikan
SPE	0.039158	2.455049	1,761	Tidak Signifikan

Sumber : Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 7)

Variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (PEP) memiliki nilai t-statistik sebesar -2,288042 < t-tabel sebesar -1,761 dengan nilai koefisien -0,006756 sehingga gagal menolak H_0 yang berarti dalam jangka panjang variabel PEP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Artinya dalam jangka panjang, kenaikan jumlah dana permodalan dan

ekonomi produktif (PEP) sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,006756 jiwa atau sebaliknya.

Variabel jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (PP) memiliki nilai t-statistik sebesar $2,761144 > t\text{-tabel}$ sebesar $-1,761$ dengan nilai koefisien $0,055425$ sehingga menolak H_0 yang berarti dalam jangka panjang variabel PP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Artinya, dalam jangka panjang, kenaikan jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (PP) sebesar 1 juta rupiah akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar $0,055427$ jiwa dan sebaliknya.

Variabel jumlah dana sarana prasarana sosial desa (SPS) memiliki nilai t-statistik sebesar $-2,124612 < t\text{-tabel}$ sebesar $-1,761$ dengan nilai koefisien $-0,410955$ sehingga gagal menolak H_0 yang berarti dalam jangka panjang variabel SPS memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Artinya, dalam jangka panjang, kenaikan jumlah dana sarana prasarana sosial desa (SPS) sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar $0,410955$ jiwa dan sebaliknya.

Variabel jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (SPE) memiliki nilai t-statistik sebesar $2,455049 > t\text{-tabel}$ sebesar $-1,761$ dengan nilai koefisien $-0,410955$ sehingga menolak H_0 yang berarti dalam jangka panjang variabel SPE memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap variabel jumlah uang beredar. Artinya, dalam jangka panjang, kenaikan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (SPE) sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar $0,039158$ jiwa dan sebaliknya.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui variable independent secara Bersama-sama berpengaruh atau tidak dengan variable dependen. Uji F dilakukan dengan cara memasukkan semua variable independent dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependen. Sedangkan perhitungan uji simultan bisa dilihat dengan probabilitas (F-Statistic) dan α (0,05) atau F_{hitung}

terhadap F_{tabel} dengan rumus *degree of freedom*, $df_1 (k-1) = 5-1 = 4$ dan $df_2 (n-k) = (19 - 5 = 14)$. Dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.18

Hasil Pengujian F

F-statistik	F-Tabel	Prob
2.458902	3.1122	0.040262

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 5)

Berdasarkan table 4.18 dapat diperoleh nilai F_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan F_{tabel} ($2.458902 < 3.1122$) dan probabilitas sebesar 0.040262 atau lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga variable jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (PEP), jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (PP), jumlah dana sarana prasarana sosial desa (SPS), dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (SPE) tidak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) secara signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Desa Glagah.

3. Koefisien Determinan

Koefisien determinan menunjukkan seberapa besar presentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.19

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

R-Squared	Adjusted R-Squared
0.767669	0.704654

Sumber: Hasil pengolahan data output Eviews-12 (Lampiran 5)

Berdasarkan table 4.19 diperoleh nilai R-Squared sebesar 0.767669 dengan nilai adjusted R-squared sebesar 0.704654 artinya kemampuan pengaruh variable jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif (PEP), jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat (PP), jumlah dana sarana prasarana sosial desa (SPS), dan jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa (SPE) dapat menjelaskan variabel jumlah penduduk miskin di Desa Glagah secara simultan (bersama-sama) yakni

sebesar 70,4%, sedangkan sisanya sebesar 29,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Peran jumlah dana Permodalan dan Ekonomi Produktif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, variabel jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif dalam jangka pendek menghasilkan koefisien negatif berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin artinya sesuai dengan hipotesis awal karena diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di desa Glagah. Pengaruh negatif jumlah dana permodalan dan ekonomi produktif satu Tahun sebelumnya terjadi karena dana permodalan merupakan modal yang besar bagi ekonomi produktif. Tanpa modal yang cukup, kegiatan ekonomi produktif sulit berkembang. Sebaliknya, tanpa ekonomi yang produktif, modal yang ada mungkin tidak tersalurkan secara efisien atau tidak menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk siklus positif di mana investasi mengarah pada produksi, produksi menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, dan peningkatan pendapatan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori penelitian ini yaitu Robert Putnam (1993) menjelaskan dana permodalan dan ekonomi produktif tidak akan secara otomatis mengurangi kemiskinan jika tidak ada fondasi modal sosial yang kuat. Modal sosial mengaktifkan dan memperkuat dampak positif dari dana permodalan dan kegiatan ekonomi produktif. Tanpa kepercayaan, norma resiprositas, dan jaringan yang berfungsi, investasi bisa tersendat, produktivitas rendah, dan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, sehingga meninggalkan sebagian besar penduduk dalam kemiskinan. Jadi, modal sosial adalah penghubung esensial yang membuat dana permodalan dan ekonomi produktif menjadi alat yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuddin et al., 2019 dan Aswariningsih, 2022), yang menyimpulkan bahwa permodalan dan

ekonomi produktif terdapat dalam alokasi dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

4.3.2. Peran Jumlah dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, variabel jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek menghasilkan koefisien negatif pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin artinya sesuai dengan hipotesis awal yakni diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di desa Glagah. Dengan kata lain jumlah dana peningkatan pendapatan masyarakat mengurangi jumlah penduduk miskin di desa Glagah. Jumlah dana peningkatan Pendapatan masyarakat memiliki potensi besar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di tingkat desa melalui berbagai mekanisme yang saling terkait, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan dasar, stimulasi ekonomi lokal, pengurangan kerentanan, hingga peningkatan partisipasi dan akuntabilitas. Namun, efektivitas dana desa dalam mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada perencanaan yang matang, implementasi yang tepat sasaran, dan pengawasan yang efektif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan landasan teori penelitian ini yaitu Robert Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan. Pengelolaan dana desa yang partisipatif dan transparan dapat memperkuat modal sosial desa, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas program peningkatan pendapatan. Hal ini relevan dalam konteks pengembangan BUMDes dan koperasi desa yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi antar anggota. Pengelolaan dana desa dan dana peningkatan pendapatan sering melibatkan musyawarah desa dan pembentukan kelompok-kelompok usaha. Proses ini membangun modal sosial (kepercayaan, jaringan, norma kerjasama) di antara warga desa. Modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana peningkatan pendapatan, memastikan akuntabilitas, dan mendorong keberlanjutan usaha yang didukung dana tersebut. Kelompok usaha yang solid, misalnya, lebih mudah mendapatkan

akses dan mengelola dana secara efektif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuddin et al., 2019 dan Aswariningsih, 2022), yang menyimpulkan bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

4.3.3. Peran Jumlah dana Sarana Prasarana Sosial Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dana sarana prasarana sosial desa dalam jangka pendek satu tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di Desa Glagah. Sedangkan jumlah dana sarana prasarana sosial desa dalam jangka pendek dua tahun sebelumnya menghasilkan koefisien negatif pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin artinya sesuai dengan hipotesis awal yakni diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di desa Glagah. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah diasumsikan bahwa jumlah penduduk miskin akan menurun mengingat adanya jumlah dana sarana prasarana sosial desa ini.

Jumlah dana sarana prasarana sosial desa dari BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Namun, dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan cenderung tidak langsung dan memerlukan waktu yang lebih lama. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara efektif, BUMDes perlu fokus pada kegiatan ekonomi. Sinergi antara kegiatan sosial dan ekonomi BUMDes, serta integrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya, akan menjadi kunci untuk mencapai dampak yang lebih signifikan.

4.3.4. Peran dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa terhadap Jumlah Penduduk Miskin di desa Glagah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Desa Glagah. Hal ini tidak sejalan dengan hipotesis

yang telah diasumsikan bahwa jumlah penduduk miskin akan menurun mengingat adanya jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa ini.

Jumlah dana sarana prasarana ekonomi desa sebenarnya berpotensi mengurangi kemiskinan, tetapi potensi ini tidak selalu terwujud. Efektivitasnya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, skala kegiatan yang memadai, pengelolaan yang profesional dan transparan, partisipasi aktif masyarakat miskin, serta sinergi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka investasi dalam sarana prasarana ekonomi BUMDes bisa saja tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait pengaruh dari kegiatan BUMDes seperti Pengelolaan Sosial Dasar, Permodalan dan Ekonomi Produktif, Peningkatan Pendapatan, Sarana Prasarana Sosial, dan Sarana Prasarana Ekonomi pada rentan tahun 2005 sampai 2023 yang telah dilakukan maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Dana Permodalan dan ekonomi produktif memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan rentan tahun 2005 - 2023.
2. Jumlah Dana Peningkatan Pendapatan Masyarakat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan rentan tahun 2005 - 2023.
3. Jumlah Dana Sarana Prasarana Sosial Desa tidak berpengaruh di satu tahun sebelumnya Sedangkan di dua tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan rentan tahun 2005 - 2023.
4. Jumlah Dana Sarana Prasarana Ekonomi Desa tidak berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dengan rentan tahun 2005 - 2023.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Pengelola BUMDes yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola BUMDes dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan pemahaman isu-isu kemiskinan.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas yaitu dengan memastikan pengelolaan seluruh kegiatan BUMDes, termasuk alokasi dan penggunaan dana, dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
3. Sinergi dengan Pemerintah Desa dan Pihak Lain yaitu dengan memperkuat koordinasi dan sinergi antara BUMDes dengan pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan pihak swasta dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Penelitian Lanjutan yaitu dengan dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami mekanisme kausal yang mendasari pengaruh negatif dan tidak signifikan dari pengelolaan sosial dasar dan sarana prasarana (sosial dan ekonomi) terhadap kemiskinan. Penelitian kualitatif dapat membantu menggali perspektif masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2018). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) berbasis aspek modal sosial (studi pada bumdes surya sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Universitas Airlangga.
- Agusliansyah, K. (2016) 'Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser', E-Journal Ilmu Pemerintahan, 4 (4), p. 1785-1796
- Atmojo, M.E., Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama. (2017) 'Efektivitas Dana Desa untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Bangunjiwo', Journal. Umpo, 5 (1), p. 126-140
- Dirianzani, L., Sugiono, S., & Hardiningtyas, D. (2014). Analisis pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja karyawan borongan dengan komitmen organisasi sebagai mediasi (studi kasus: Perusahaan Rokok Adi Bungsu Malang). *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Industri*, 2(5), 131584.
- Dwiningwarni, S. S., & Amrulloh, A. Z. (2020). Peranan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Jombang Jawa Timur. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 1–20.
- Ema, (2017). Pengelolaan Pendapatan Dana Desa dengan Tujuan Mengalokasikan Kebutuhan Desa
- Eni. (1967). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.

- Feiby Venceti, (2017), “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Irawati, D., & Widjaja, H. (2006). *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Uki Press.
- Kamaroesid, H. (2016) Tata Cara Pendirian dan Penngelolaan BUMDES. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kirowati, D., & Setia, L. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 3(1).
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maulana, M. I. (2018). *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mulyawan, R. (2016) Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan. Bandung: UNPAD Press.
- Mustofa, A., & Afifah, F. A. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62.
- Patty, R., Setiawan, A., & Urip, T. P. (n.d.). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Tablasupa Distrik Depapre

Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 6(2), 564759.

Permatasari, V. B. D. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran, Upah minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. N. 13 T. 2020. (2020). Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(2)

Putra, M. Y. D. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Putri. (2019) Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa

Rafsanjani, H., Supriyono, B., dan Suwondo. (2013) ‘Kemitraan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa (Studi pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)’, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (4), p. 67-72.

Ramadhani aqmarani.(2017) Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok.

- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Sumber*, 100(100), 2–59.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Roesmidi, R.R. (2006) Pemberdayaan Masyarakat, Sumedang: Alqa Print Jatinangor.
- Saputra, R. (2017) ‘Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat’, *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9 (1), p. 15-31
- Septyarini, D.A. (2018). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangkisan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Periode Tahun 2015-2016. Artikel Penelitian, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
- Setianingsih, I. (2016). Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 5(3).
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta

Sutoro, dkk. (2016). Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Penelitian

Tahun	JPM	PEP	PP	SPS	SPE
2005	486	Rp6.118.500	Rp16.000.000	Rp550.000	Rp1.380.000
2006	540	Rp6.750.000	Rp19.500.000	Rp600.000	Rp1.540.000
2007	505	Rp7.305.000	Rp22.800.000	Rp650.000	Rp1.950.000
2008	507	Rp8.916.000	Rp29.000.000	Rp750.000	Rp2.000.000
2009	463	Rp9.165.000	Rp36.950.000	Rp900.000	Rp2.430.000
2010	431	Rp11.413.000	Rp40.000.000	Rp1.000.000	Rp2.870.000
2011	406	Rp14.625.000	Rp48.700.000	Rp1.050.000	Rp3.100.000
2012	470	Rp17.320.000	Rp54.300.000	Rp1.150.000	Rp3.650.000
2013	513	Rp23.303.000	Rp59.800.000	Rp1.150.000	Rp5.250.000
2014	529	Rp27.499.000	Rp67.000.000	Rp1.250.000	Rp6.000.000
2015	547	Rp35.122.000	Rp71.200.000	Rp1.250.000	Rp6.700.000
2016	554	Rp55.710.000	Rp82.000.000	Rp1.300.000	Rp8.000.000
2017	713	Rp71.800.000	Rp89.600.000	Rp1.300.000	Rp8.500.000
2018	738	Rp130.205.000	Rp92.700.000	Rp1.450.000	Rp9.100.000
2019	634	Rp164.484.000	Rp97.450.000	Rp1.450.000	Rp9.800.000
2020	625	Rp150.512.000	Rp100.200.000	Rp1.550.000	Rp10.000.000
2021	584	Rp188.742.000	Rp123.600.000	Rp1.650.000	Rp10.000.000
2022	532	Rp200.662.000	Rp170.300.000	Rp1.650.000	Rp10.200.000
2023	470	Rp230.266.000	Rp214.000.000	Rp1.800.000	Rp11.400.000

Lampiran 2. Uji Akar Unit Tingkat Level

a. Variabel JPM

Null Hypothesis: JPM has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.356021	0.5798
Test critical values: 1% level	-3.857386	
5% level	-3.040391	
10% level	-2.660551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

b. Variabel PEP

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	1.768838	0.9993
Test critical values: 1% level	-3.857386	
5% level	-3.040391	
10% level	-2.660551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

c. Variabel PP

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.954776	0.0587
Test critical values: 1% level	-3.857386	
5% level	-3.040391	
10% level	-2.660551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

d. Variabel SPS

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	0.758348	0.9899
Test critical values: 1% level	-3.857386	
5% level	-3.040391	
10% level	-2.660551	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

e. Variabel SPE

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.100929	0.0457
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Lampiran 3. Uji Akar Unit Tingkat *First Difference*

Variabel JPM

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.099718	0.0458
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel PEP

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.742559	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel PP

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.327466	0.0001
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Variabel SPS

Null Hypothesis: D(JPM) has a unit root

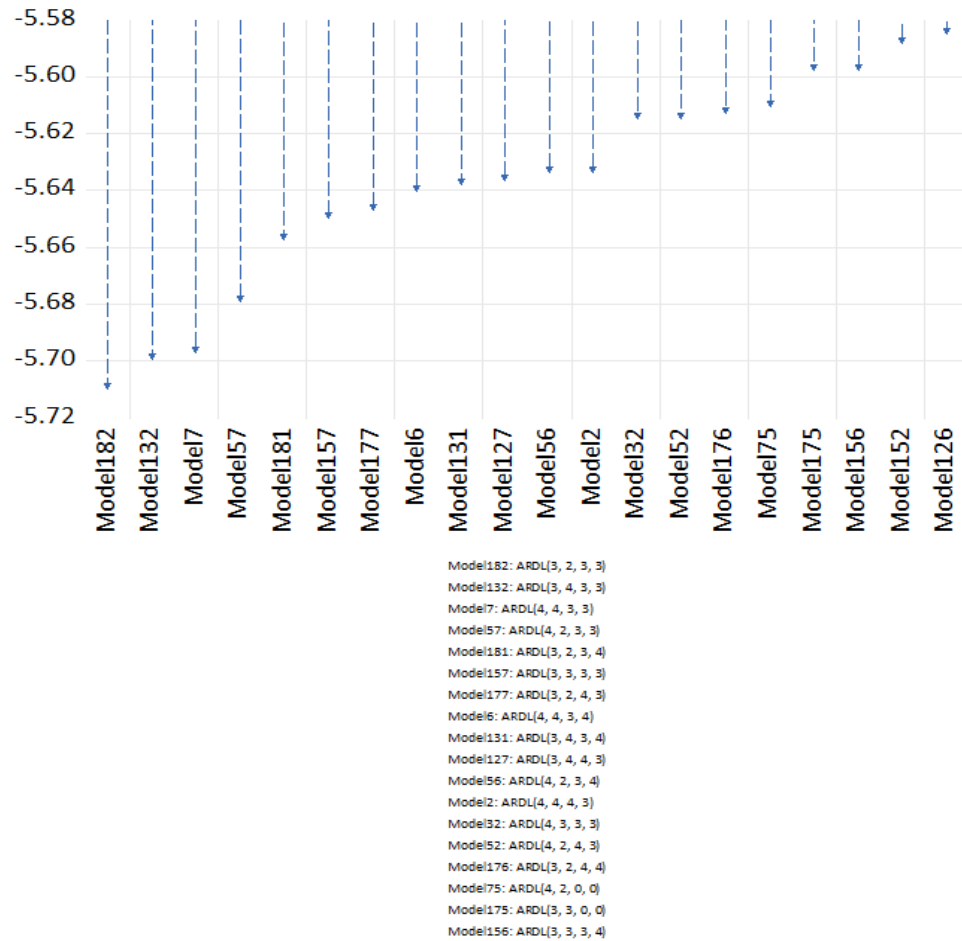
Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-4.144506	0.0060
Test critical values: 1% level	-3.886751	
5% level	-3.052169	
10% level	-2.666593	

Lampiran 4. Penentuan Lag Optimum

Akaike Information Criteria (top 20 models)



Lampiran 5. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Dependent Variabel: D(JPM)

Method: ARDL

Date: 07/14/25 Time: 20:59

Sample (adjusted): 2005 2023

Included observations: 19 after adjustments

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): D(PEP) D(PP) D(SPS) D(SPE)

Fixed regressors: C

Selected Model: ARDL(3, 2, 3, 3)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(JPM(-1))	0.771154	0.232579	3.315664	0.0041
D(JPM(-2))	0.436315	0.177188	2.462445	0.0248
D(PEP)	-0.005221	0.004386	-1.190265	0.2503
D(PEP(-1))	-0.013040	0.004201	3.103983	0.0064
D(PP)	0.015962	0.010687	1.493590	0.1536
D(PP(-1))	-0.070793	0.017286	-4.095380	0.0008
D(SPS)	-1.250078	1.642304	-0.761173	0.4714
D(SPS(-1))	1.266358	1.827599	0.692908	0.0021
D(SPS(-2))	0.035777	0.009641	3.711093	0.0017
D(SPE)	0.033152	0.124027	0.267294	0.7925
D(SPE(-1))	0.549478	0.106276	5.170303	0.0001
D(SPE(-2))	0.365259	0.099890	3.656614	0.0020
R-squared	0.767669	Mean dependent var		0.000551
Adjusted R-squared	0.704654	S.D. dependent var		0.023846
S.E. of regression	0.010539	Akaike info criterion		-6.001087
Sum squared resid	0.002333	Schwarz criterion		-5.497241
Log likelihood	107.0174	Hannan-Quinn criter.		-5.834076
F-statistic	2.458902	Durbin-Watson stat		2.052967
Prob(F-statistic)	0.040262			

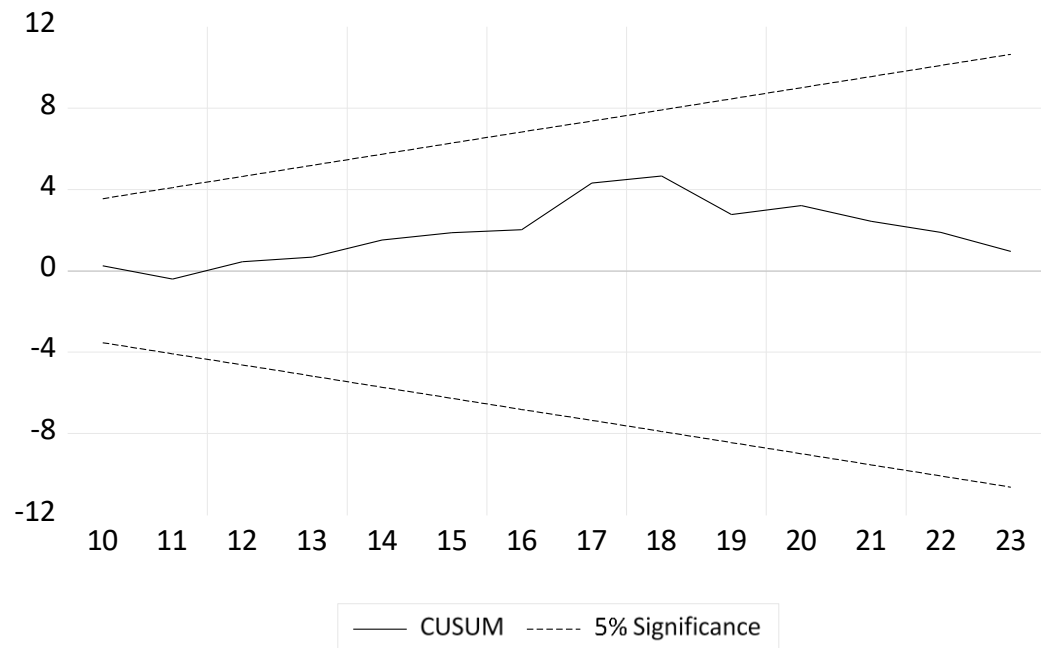
Lampiran 6. Uji Kointegrasi Bound Test

F-Bounds Test		Null Hypothesis: No levels relationship		
Test Statistic	Value	Signif.	I(0)	I(1)
Asymptotic: n=1000				
F-statistic	7.066287	10%	2.37	3.2
k	3	5%	2.79	3.67
		2.5%	3.15	4.08
		1%	3.65	4.66
Finite Sample: n=35				
Actual Sample Size	32	10%	2.618	3.532
		5%	3.164	4.194
		1%	4.428	5.816
Finite Sample: n=30				
		10%	2.676	3.586
		5%	3.272	4.306
		1%	4.614	5.966

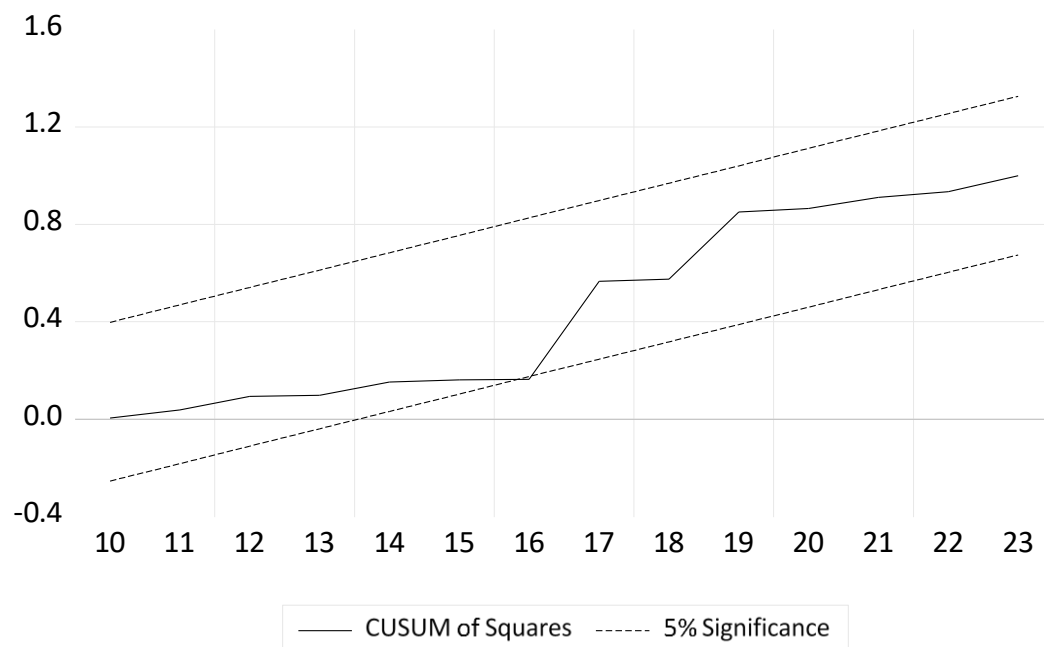
Lampiran 7. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Levels Equation				
Case 2: Restricted Constant and No Trend				
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEP	-0.006756	0.002953	-2.288042	0.0352
PP	0.055427	0.020074	2.761144	0.0134
SPS	-0.410955	0.193426	-2.124612	0.0586
SPE	0.039158	0.042010	2.455049	0.6629
C	0.025173	0.002322	10.83882	0.0000

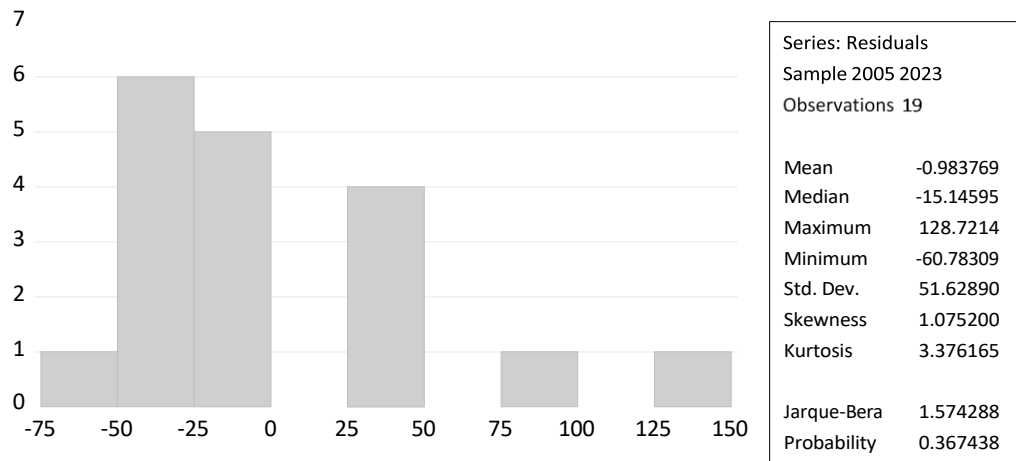
Lampiran 8. Uji Stabilitas CUSUM



Lampiran 9. Uji Stabilitas CUSUM Test



Lampiran 10. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas



Lampiran 11. Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/14/25 Time: 21:08

Sample: 2005 2023

Included observations: 19

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
D(JPM(-1))	0.043605	6.284407	2.237487
D(JPM(-2))	0.039038	5.840557	1.940412
D(PEP)	3.19E-05	1.886076	1.869754
D(PEP(-1))	4.01E-05	2.358008	2.330018
D(PP)	0.000208	4.768419	4.764706
D(PP(-1))	0.000270	4.097868	4.045825
D(SPS)	0.001990	6.160377	4.751105
D(SPS(-1))	0.002907	1.389410	4.884394
D(SPS(-2))	0.000331	4.484188	4.477400
D(SPE)	0.033499	5.237578	4.442337
D(SPE(-1))	0.027314	4.326876	3.763468
D(SPE(-2))	0.030965	5.087876	4.376285
C	0.000113	26.40317	NA

Lampiran 12. Hasil Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.509051	Prob. F(14,17)	0.2083
Obs*R-squared	17.73179	Prob. Chi-Square(14)	0.2193
Scaled explained SS	3.607768	Prob. Chi-Square(14)	0.9974

Lampiran 13. Hasil Uji Asumsi Klasik Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	0.426600	Prob. F(2,15)	0.6604
Obs*R-squared	1.722200	Prob. Chi-Square(2)	0.4227